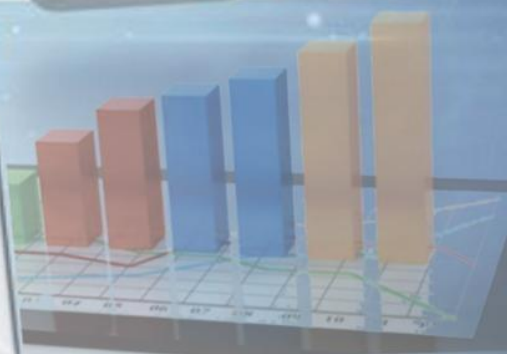
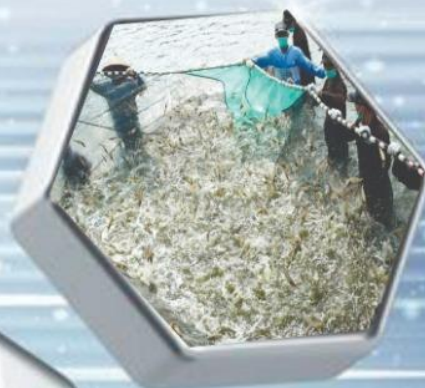




# Rencana Kerja (RENJA)

T a h u n 2 0 2 5



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya “**Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025**” sebagai acuan dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan dan penyusunan KUA PPAS Tahun 2025.

Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan terutama pada sektor perikanan dan kelautan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 2024



**KEPALA DINAS**

**DR. M. ILYAS, ST. M.Sc**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman

### B. SK Penetapan

A. KATA PENGANTAR .....	i
B. DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	54
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	65
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	109
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>118</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	118
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	119
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....</b>	<b>129</b>
4.1. Program dan Kegiatan.....	129
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>186</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah telah mengalami perubahan cara berpikir dari berorientasi daratan menjadi berorientasi maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan Ekonomi Biru dapat menjadi solusi untuk mengembangkan wilayah yang memiliki potensi laut yang besar di Sulawesi Selatan, namun bukan tanpa tantangan. Untuk memaksimalkan potensi dan mencegah tantangan Ekonomi Biru perlu dilakukan **kerja sama antara semua pihak yang terkait**. Sudah saatnya kita meningkatkan kesadaran kita terhadap potensi laut kita dan berinovasi dalam mengembangkan sektor Ekonomi Biru sehingga tercipta Indonesia yang berkelanjutan. Besarnya potensi sumber daya kelautan pada Satuan Wilayah Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan ternyata belum sepenuhnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada nelayan, pembudidaya dan unit pengolahan skala menengah dan kecil. Sumberdaya kelautan yang ada belum dapat dimaksimalkan dengan pengolahan perikanan yang baik. Belum adanya keterpaduan pengembangan perikanan karena masing-masing daerah mempunyai program tersendiri sehingga perlu memaksimalkan potensi perikanan dan kelautan dengan perspektif keruangan. Oleh karena itu pada tahun 2025 tema pembangunan mengarah pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah.

Adanya kebijakan nasional terkait ekonomi biru, penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim menjadi tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk berperan dalam pembangunan pada tahun 2025. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025- 2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN dan RKP serta RKPD Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu “Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (TATA KELOLA) .
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (INFRASTRUKTUR) dengan tematik Investasi.
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PENGEMBANGAN WILAYAH DAN HILIRISASI) dengan tematik Ketahanan Pangan, Penanganan Stunting dan Pengendalian Inflasi.



4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (SOSIAL EKONOMI) dengan tematik Penanganan dan Pengurangan Kemiskinan .
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Oleh karena itu pada tahun 2025 perlu menyusun suatu perencanaan yang efektif, efisien, tematik dan inklusif untuk merespon permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan saat ini dan disusun dalam suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan ekonomis, efisien dan efektif yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART. Rencana Kerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 disusun secara terpadu dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dalam menghadapi era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321).
39. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);



40. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

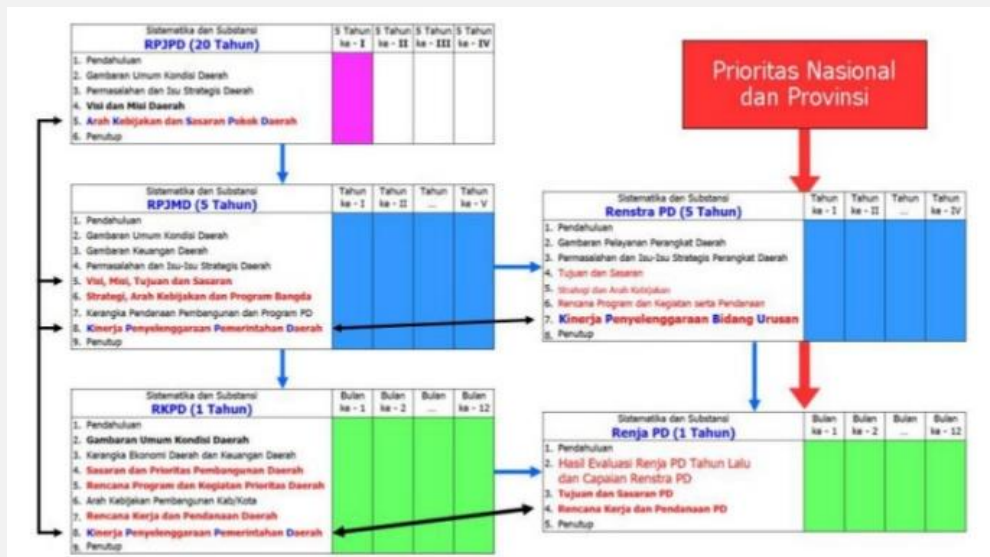
Maksud penyusunan Renja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mengacu pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan, (2) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, (3) mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan,

#### **1.3.2. Tujuan**

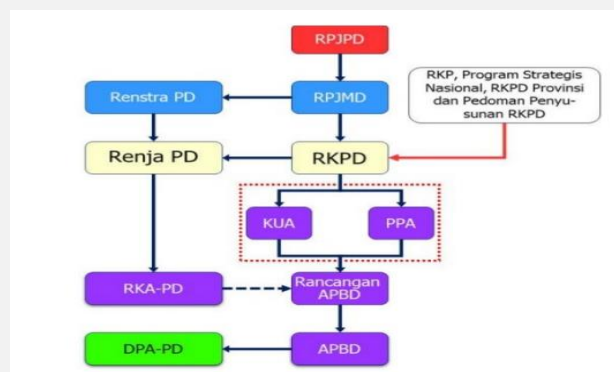
Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 adalah (1) tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, (2) sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan dengan memperluas cakupan sesuai pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (3) untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya. (4) sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2023 dan tahun berjalan tahun 2024, serta perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025.

Keterkaitan dokumen Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah seperti ditunjukkan pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**  
**Keterkaitan dokumen Renja Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah**



**Gambar 1.2**  
**Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD**



#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan meliputi :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 (jika ada). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**  
Berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, rumusan program kegiatan yang baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD;

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,**

Menguraikan tentang Rencana Kerja dengan pendanaan yang sesuai

**BAB V PENUTUP,**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENJA TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu disajikan pada tabel 2.1 dalam bentuk format Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah**  
**dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Provinsi Sulawesi Selatan**  
**(Tabel T-C.29 sesuai lampiran Permendagri 86 tahun 2017 )**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRA M DAN KEGIATA N (RENJA- PD TAHUN 2025)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN		
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISAS I RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKA T REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3	25	0.00.0.00. 38.0000				Dinas Kelautan dan Perikanan										
3	25	0.00.0.00.38 .0000	3.2 5.0 2			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	Produksi garam rakyat	Ton	328,634.90	186.932.37	47.500	3.282.93	6.91%	48,450.0	238.665.3	72.62%
							Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	%	100.0	97.03	74.08	49.49	66.81%	100	100	100%
							Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	%	67.31	67.29	67.30	81.95	121.76%	67.31	67.31	100%
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3.2 5.0 2	3.25. 02.1 01		3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi (unit)	Unit	165.0	56	56	56	100.00%	56	168	101.81%
							Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi	Ha	165.0	55	55	57	103.63%	55	167	101.21%
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3 .25. 02	3. 25.0 2.1.0 1	0 2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen Penetapan Pencadangan Kawasan	Dokumen	5.0	1	2	2	100%	2	5	100%
							Jumlah Regulasi Konservasi dan Penataan Ruang Laut	Regulasi	9.0	1	3	3	100%	3	7	77.78%
							Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K	Dokumen	3.0	2	1	3	300%	1	6	200%
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3 .25. 02	3. 25.0 2.1.0 1	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan PulauPulau Kecil	Jumlah Tambatan Perahu yang terbangun	Unit	36.0	9	12	12	100%	12	33	91.60%
							Jumlah Rehabilitasi ekosistem pesisir	Batang	1,650,000.0	532,990	550,000.0	570.000	103.63%	550,000.0	1.652.000	100.1%
							Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut	Unit	21.0	10	7	8	106.67%	7	25	119%
							Jumlah Pengelolaan dan Pembinaan Panatai Berseri	Unit	15.0	6	5.0	5.0	110	5	16	106.7%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGR AM DAN KEGIAT AN (RENJA- PD TAHUN 2025)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISAS I RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3	2	0.00.0.00.3	3.25.0	3.25.0		3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil	Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	72.0	7	24	10	58.33%	24	55	76.38%
	5	8.0000	2	2.1.03			Jumlah sarana dan prasarana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3.0	1	1	1	100%	1	3	100%
3	2	0.00.0.00.3	3.25.0	3.25.0	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil	Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir	30.0	6.0	10	5	50%	10	21	70%
3	2	0.00.0.00.3	3.25.0	3.25.0	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil	Jumlah sarana dan prasarana usaha garam	30.0	5	10	10	100%	10	25	83.33%
3	2	0.00.0.00.3	3.25.0	3.25.0	04	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam	2,160.0	720	720	720	100%	720	2160	100%
	5	8.0000	2	2.1.03			Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan usaha alternatif masyarakat pesisir berbasis inovasi	3.0	1	1	1	100%	3.0	3.0	100%
3	2	0.00.0.00.3	3.25.03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	78.95	0.0	0.0	0.0	0.0	57.89	57.89	73.32
	5	8.0000					Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap	44,398.86	10,679,9	9.029.52	11.812,9	130.82%	9,210.12	49.013.12	110.39%
							Produksi perikanan tangkap	2,002,572.90	1.205.184.1	404.932,2	436.749,6	105.14%	413,030.8	2.054.964.5	102.61%
							Cakupan Bina Kelompok Nelayan	131.45	17.52	20.06	6.68	33.30	23.89	48.09	36.58
							Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	124.15	43.81	24.46	12.89	52.7	25.61	82.31	66.30
3	2	0.00.0.00.3	3.25.03	3.25.03.1.01		3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	744.0	0.0	0.0	8.0	25.61	8.0	1.08	6.10
	5	8.0000					Jumlah nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah	591.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	2	0.00.0.00.3	3.25.03	3.25.03.1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang dibangun	42.0	28.0	0.0	0.0	0.0	13.0	41.0	97.62

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIAT AN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2025)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISA SI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3	2	0.00.0.00.3 8.0000	3 .25 .04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya Persentase ketersediaan benur berkualitas Rp. M Ton %	28,500.0 19.657.454.7 300.0	14,856.34 7.375.873.2 0.0	14,474.73 3,898,76 7.40 100.0	12,119.87 4.081.48 0.5 80.89	73.12 140.68	12,119.87 4.093.705.8 80.89	39,096.08 15.551.059.5 0.0	137.179 79.11
3	2	0.00.0.00.3 8.0000	3.25. 04	3.25.04.1.0 5	3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah produksi benur yang berkualitas Jumlah areal pengelolaan pembudidaya ikan Unit Ekor Ha	90,000,000. 0 3,390.0 397.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17,391,0 00.0 130.0 226.0	73.12	17,391,000.0 130.0 226.0	19.32 3.83 56.93	31.53
3	2	0.00.0.00.38. 0000	3.25. 04	3.25.04.1.0 5	02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kebun laut yang tersedia Jumlah sarana prasarana budidaya laut Unit Unit	7.0 390.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 118.0	45.72	0.0 118.0	0.0 30.26	8.18
3	2	0.00.0.00.3 8.0000	3.2 5.0 4	3.25.04. 1.05	04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah induk unggul untuk menghasilkan benih Ekor	2,250.0	0.0	0.0	10,000.0	69.88	10,000.0	444.44	29.61
3	2	0.00.0.00.3 8.0000	3.2 5.0 4	3.25.04. 1.05	06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah KabupatenKota	Jumlah Pengendalian Kualitas Lingkungan Perikanan Budidaya Perbenihan Unit	39.0	0.0	0.0	10.0	55.50	10.0	25.64	10.62
3	2	0.00.0.00.3 8.0000	3.25. 04	3.25.04. 1.05	07 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Laporan	3.0	0.0	0.0	0.0	88.47	0.0	0.0	13.83

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRA M DAN KELUARA N KEGIATA N s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2025)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN		
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
3	2	0.00.0.0 0.38.0000	3.25 .05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	0.0	71.57	87.48	71.57	75.03	71.57	0.0	1,088.89
3	2	0.00.0.0 0.38.0000	3.25 .05	3.25.05. 1.01		3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil	Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Unit	100.0	26	0.0	26.0	75.03	26.0	26.0	2,214.60
							Jumlah unit usaha yang mendapatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yaitu pengawasan biota laut , pengawasan dokumen kapal, pengawasan aktivitas penangkapan ikan	Unit	27.0	104	0.0	104.0		104.0	385.19	
3	2	0.00.0.0 0.38.0000	3.25 .05	3.25. 05.1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil	Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi	Jenis	3.0	0.0	0.0	1.0	96.27	1.0	33.33	47.75
							Jumlah peserta koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian SDKP	Orang	360.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
							Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan	Kelompok	90.0	0.0	0.0	20.0		20.0	22.22	
							Jumlah laporan pengawasan terpadu	Laporan	3.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
3	2	0.00.0.0 0.38.0000	3.25 .05	3.25. 05.1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan Mil	Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Unit	100.0	0.0	0.0	19.0	74.75	19.0	19.0	
							Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi wilayah bosowasi	orang	300.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
							Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan wilayah ajatappareng	unit	21.0	0.0	0.0	20.0		20.0	95.24	

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2025)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISAS 1 (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3-25.0 6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi Ton Persentase Pembinaan mutu produk perikanan % Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi Milyar		2,373.50	7,051.70	2,373.50	89.31	2,373.50	0.0	20.16
								100.0	50.48	60.0	50.48		50.48	50.48	
								317.28	19.13	304.9 6	19.13		19.13	6.03	
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3-25.0 6	3-25. 06.1.02		3-25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdayasaing Unit Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Unit usaha	210.0	0.0	0.0	0.0	89.31	0.0	0.0	20.86
								300.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3-25.0 6	3-25. 06.1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil KP Konsumsi dan Non Konsumsi Jenis Produk Inovasi Jumlah promosi yang diikuti Kegiat an promos i Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan Orang Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha Unit Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk UPI	12.0	0.0	0.0	0.0	50.19	0.0	0.0	8.79
								6.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
								180.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
								3.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
								210.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3-25.0 6	3-25. 06.1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk UPI Jumlah Sampel Produk yang Dilakukan Pengujian Mutu Hasil uji Mutu Jumlah validasi sarana prasarana laboratorium pengujian Unit Jumlah laporan penerapan prosedur mutu Jenis	300.0	0.0	0.0	0.0	93.98	0.0	0.0	22.86
								300.0	0.0	0.0	786.0		786.0	262.0	
								12.0	0.0	0.0	1.0		1.0	8.33	
								3.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRA M DAN KELUARA N KEGIATA N s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2025)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
											TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3		4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3	2 5	0.00.0.00.3 8.0000	X.X X.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100.0	4	100.0	4	86.31	40.07	80.14	80.14
							Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100.0	75.0	100.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
							Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	10.53	7.20	8.70	7.20	82.75	5.10	12.30	117.14
3	2 5	0.00.0.00.3 8.0000	X.X X.01	X.XX .01.1.01		X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Doku men	21.0	7.0	7.0	7.0	100	7.0	14	66.66
3	2 5	0.00.0.00.3 8.0000	X.X X.01	X.XX. 01.1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Doku men	45.0	15.0	15.0	15.0	100	15.0	30	66.66
3	2 5	0.00.0.00.3 8.0000	X.X X.01	X.XX. 01.1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Doku men	144.0	26.0	26.0	26.0	100	26.0	52	66.66
3	2 5	0.00.0.00.3 8.0000	X.X X.01	X.XX. 01.1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Doku men	90.0	30.0	30.0	30.0	100	30.0	60	66.66
3	2 5	0.00.0.00.3 8.0000	X.X X.01	X.XX. 01.1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Doku men	30.0	10	10	10	100	10	20	66.66
3	2 5	0.00.0.00.3 8.0000	X.X X.01	X.XX. 01.1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Doku men	90.0	30.0	30.0	30.0	100	30.0	60	66.66
3	2 5	0.00.0.00.3 8.0000	X.X X.01	X.XX. 01.1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Doku men	30.0	9.0	9.0	9.0	100	9.0	18	60.00
							Jumlah data dan Informasi	Lapor an	18.0	6.0	6.0	6.0	6.0	12.0	60.00	
							Jumlah Data Yang Dipublikasikan	Jenis	18.0	6.0	6.0	6.0	6.0	12.0	60.00	
3	2 5	0.00.0.00.3 8.0000	X.X X.01	X.XX. 01.1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Doku men	36.0	9.0	9.0	9.0	100	9.0	18.0	50.00



KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGR AM DAN KEGIATA N (RENJA- PD TAHUN 2025)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN			
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1						2		3		4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.XX.01	X.XX.01.1.02		X.XX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Laporan	178.0	0.0	33	33.0	100	33.0	18.54	27.72	
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.XX.01	X.XX.01.1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan tepat waktu	Laporan	36.0	0.0	9	9.0	100	9.0	25.0	27.74	
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.XX.01	X.XX.01.1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan	Laporan	36.0	0.0	0.0	9.0	100.0	9.0	25.0	49.28	
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.XX.01	X.XX.01.1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi	Laporan	3.0	0.0	1	1	100	0.0	0.0	24.47	
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.XX.01	X.XX.01.1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan dan dikelola	Laporan	3.0	0.0	1	1	100	1.0	33.33	16.21	
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.XX.01	X.XX.01.1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun dan telah terkoordinasi	Laporan	54.0	0.0	130	13.0	100	13.0	24.07	24.98	
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.XX.01	X.XX.01.1.05		X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	%	275.0	0.0	50	50.0	100	50.0	100.0	36%	
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.XX.01	X.XX.01.1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan admibnistrasi kepegawaian yang dikelola	Laporan	36.0	0.0	9.0	9.0	100	9.0	18.0	50%	
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.XX.01	X.XX.01.1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data sistem informasi kepegawaian yang telah dikoordinasi	Laporan	36.0	0.0	9.0	9.0	100	9.0	18.0	50%	
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.XX.01	X.XX.01.1.05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Laporan	36.0	0.0	9.0	9.0	100	9.0	18.0	50%	

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2025)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3	25	0.00.0.00 .38.0000	X.X X.01	X.XX. 01.1.0 9		X.XX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Unit	45	15	15	100	15	45	100%
3	25	0.00.0.0 0.38.000 0	X.X X.01	X.XX. 01.1.0 9	X.XX. 01.1.0 9.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan bebas pajak	unit	45	15	15	100	15	45	67%
3	25	0.00.0.0 0.38.000 0	X.X X.01	X.XX. 01.1.0 9	X.XX. 01.1.0 9.02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak	unit	45	15	15	100	15	45	9%
3	25	0.00.0.0 0.38.000 0	X.X X.01	X.XX. 01.1.0 9	X.XX. 01.1.0 9.09	XXX Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			13	1	1	100	1	3	23%

Pada tabel 2.1 atau tabel TC-29 dilampirkan data capaian tahun 2023 sesuai dengan numenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Permendagri no. 90 Tahun 2019. Berdasarkan alokasi penggunaan anggaran tersebut maka sesuai rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja pada tahun lalu dan berjalan maka dapat disampaikan hal penting sebagai berikut :

**1 Realisasi Program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .**

Kinerja program /kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra sampai tahun 2023 adalah :

Level Program :

- a. Target produksi garam sampai tahun 2023 sebesar 295.388,29 ton dengan melaksanakan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan capaian indikator Produksi Garam selama 5 tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023 capaian produksi garam sebesar 279.472,91 ton atau sebesar 94,61%.

**Hambatan dan Kendala yang dihadapi :**

Produksi garam menghadapi berbagai hambatan dan kendala, meskipun terkadang faktor-faktor ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam produksi garam yang mengalami penurunan:

**1. Kondisi Cuaca dan Iklim:**

Hujan berlebihan atau musim hujan yang panjang dapat menghambat proses penguapan air laut yang diperlukan untuk memproduksi garam. Sebaliknya, kekeringan yang berkepanjangan juga dapat mempengaruhi produksi garam.

**2. Teknologi dan Infrastruktur:**

Penggunaan teknologi yang kurang efisien atau infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi kendala dalam meningkatkan produksi garam. Investasi dalam peralatan modern dan fasilitas produksi yang baik dapat membantu mengatasi masalah ini.

**3. Regulasi dan Peraturan Lingkungan:**

Peraturan lingkungan yang ketat dapat menambah biaya produksi dan menimbulkan hambatan administratif. Produsen garam perlu mematuhi norma-norma kebersihan dan keberlanjutan untuk tetap beroperasi.

**4. Pasar dan Persaingan:**

Perubahan dalam permintaan pasar atau peningkatan persaingan dari produsen garam lainnya dapat mempengaruhi harga dan profitabilitas. Hal ini dapat menjadi kendala jika pasar garam tidak stabil.

**5. Pendidikan dan Pelatihan:**

Kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam teknik produksi yang efisien dapat menjadi kendala. Pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi pekerja dapat membantu meningkatkan produktivitas.

**6. Ketersediaan Lahan:**

Ketersediaan lahan yang memadai untuk pembuatan kolam garam atau fasilitas penguapan dapat menjadi hambatan. Pembatasan lahan oleh pemerintah atau persaingan dengan penggunaan lahan lainnya dapat menghambat produksi garam.

Tindak lanjut perbaikan :

Untuk mengatasi hambatan ini, produsen garam seringkali perlu melakukan inovasi dalam teknologi produksi, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait untuk memecahkan masalah lingkungan dan regulasi.

- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Nelayan yang baru mencapai 56,86%, Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan mencapai 57,08%, Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional mencapai 59,25%.
- c. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 57,36%.

Level Kegiatan :

- a. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mencapai

58,33%

- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil mencapai 52,94%, Jumlah nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah mencapai 54,90%
- c. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola mencapai 34,48%.
- d. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan indikator kinerja Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdayasaing mencapai 33,33% dan Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mencapai 23,33%
- e. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil mencapai 48%,

Level Sub kegiatan :

- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dengan indikator kinerja :
  - a. Jumlah Kelompok Konservasi yang dibentuk dan dibina sebesar 19,05%;
  - b. Jumlah Regulasi Konservasi dan Penataan Ruang Laut (regulasi) dengan nilai capaian sebesar 11,11%;
- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan PulauPulau Kecil dengan indikator kinerja Jumlah tambatan perahu yang terbangun mencapai 58,33%
- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dengan indikator kinerja Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir baru mencapai 40%
- Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana usaha garam mencapai 40%
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana usaha garam mencapai 36,67%

- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana usaha garam mencapai 50,98%
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah alat bantu tangkap mencapai 26%, Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 53,57%, Jumlah Nelayan yang difasilitasi dalam akses pendanaan dan jaminan perlindungan mencapai 50%.
- Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan mencapai 33,33%, Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 53,57%,
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Pengendalian Kualitas Lingkungan Perikanan Budidaya Perbenihan mencapai 58,97%,
- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan indikator kinerja Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir baru mencapai 41,67%, Jumlah promosi yang diikuti mencapai 33,33%, Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha mencapai 33,33%, Jumlah Fasilitasi dan Bimbingan pada produk perikanan yang berdaya saing mencapai 33,33%.
- Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing dengan indikator kinerja Jumlah validasi sarana prasarana laboratorium pengujian mencapai 25%
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah laporan pengawasan terpadu mencapai 33,33%.
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mencapai 48%

**2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (nilai sama)**



Kinerja program /kegiatan yang memenuhi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra sampai tahun 2023 (nilai sama) adalah :

Level Program :

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan mencapai 66,66%.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 67,69%.
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya mencapai 68,10%, Persentase ketersediaan benur berkualitas mencapai 66,67%.
- d. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan indikator kinerja Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan mencapai 63,36%, Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi mencapai 67,04% , Persentase pengujian mutu produk perikanan mencapai 66,67%

Level Kegiatan :

- a. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan indikator kinerja Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan mencapai 66,67%.
- b. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi mencapai 73,33% Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola mencapai 68,97%.
- c. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencapai 66,67%, Jumlah Dokumen Penetapan Pencadangan Kawasan mencapai 66,67%, Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K mencapai 66,67%.
- d. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dengan indikator Jumlah areal pengelolaan pembudidayaan ikan mencapai 73,33% , Jumlah produksi benur yang berkualitas 66,67%.
- e. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator Jumlah unit usaha yang mendapatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yaitu pengawasan biota laut , pengawasan dokumen kapal, pengawasan aktivitas penangkapan ikan mencapai 67,23%

Level Sub kegiatan :

- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dengan indikator kinerja : Jumlah Dokumen Penetapan Pencadangan Kawasan dengan nilai capaian 66,67%, Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K mencapai 66,67%.
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan indikator kinerja Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam mencapai 75%, Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan usaha alternatif masyarakat pesisir berbasis inovasi mencapai 66,67%
- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana usaha garam mencapai 50,98%
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah alat bantu tangkap mencapai 26%, Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 53,57%, Jumlah Nelayan yang difasilitasi dalam akses pendanaan dan jaminan perlindungan mencapai 50%.
- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 1 mencapai 71,43%, Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 2 mencapai 66,67%
- Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan mencapai 66,67%.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah 1 mencapai 66,67%.
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Provinsi dengan indikator kinerja mencapai 66,67%.
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan

Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi mencapai 66,67%.

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan indikator kinerja Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir baru mencapai 41,67%, Jumlah promosi yang diikuti mencapai 33,33%, Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha mencapai 33,33%, Jumlah Fasilitas dan Bimbingan pada produk perikanan yang berdaya saing mencapai 33,33%.
- Pelaksanaan Bimbingan Fasilitas Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing dengan indikator kinerja Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk (UPI) mencapai 66,67%, Jumlah Sampel Produk yang Dilakukan Pengujian Mutu (Hasil Uji Mutu) mencapai 67,55%, Jumlah laporan penerapan prosedur mutu mencapai 66,67%.
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi mencapai 66,67%.
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan mencapai 67,33%

**3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .**

Kinerja program /kegiatan yang melebihi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra tahun 2023 adalah

Level Program :

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan mencapai 72,76%.

- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap mencapai 75,75%.
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya mencapai 70,61%.

Level kegiatan :

- a. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi mencapai 73,33% .
- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dengan indikator Jumlah areal pengelolaan pembudidayaan ikan mencapai 73,33%

Level Sub kegiatan :

- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut mencapai 152,38%
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan indikator kinerja Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam mencapai 75%
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut dengan indikator kinerja Jumlah sarana prasarana budidaya laut dengan nilai capaian 205,38%.
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah sarana alat tangkap mencapai 147,67%
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah 2 mencapai 83,33%.
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut dengan indikator kinerja Jumlah induk unggul untuk menghasilkan benih dengan nilai capaian 427,87%,
- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan indikator kinerja Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan dengan nilai capaian 138,89%.
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok) mencapai 83,33%

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil Mil dengan indikator kinerja Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi mencapai 331,67%

#### **4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan**

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

1. Sebagian besar program mendukung untuk peningkatan produksi namun keberhasilan produksi perikanan dipengaruhi oleh faktor alam seperti perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir (garam). Tahun 2021 Sulawesi Selatan mengalami cuaca ekstrim dengan curah hujan yang cukup tinggi dan gelombang pasang;
2. Kurangnya pemberdayaan tenaga pendamping karena tidak ada biaya insentif;
3. Aktivitas masyarakat masih terbatas karena biaya operasional cukup tinggi dan sulitnya akses modal usaha (dampak dari pandemik Covid-19).
4. Perencanaan yang tidak sistematis dan kurang konsistensi terhadap dokumen perencanaan.
5. Keterbatasan anggaran , kendala teknis dalam pelaksanaan pekerjaan dan adanya kajian ulang alokasi anggaran terhadap pekerjaan kegiatan tertentu.

Faktor – faktor penyebab terpenuhinya melebihi target kinerja program/kegiatan :

1. Adanya sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan program kegiatan didukung dengan dokumen penunjang dan terarah.
3. Konsistensi pada jadwal pelaksanaan dan meminimalisir terjadinya resiko tidak terpenuhinya target kinerja.

#### **6. Implikasi atas realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target terhadap target capaian program dan kegiatan**

Implikasi atas realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target capaian program dan kegiatan yaitu tidak tercapainya target kinerja pada akhir tahun Renstra jika pelaksanaan kinerja Renja tidak memenuhi target sehingga berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta kinerja tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### **7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Adapun kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :

- a. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, penganggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.
- b. Perlu kegiatan mengkaji penerapan teknologi tunnel/rumah prisma dengan konstruksi “diperbaharui” sebagai percontohan/kawasan di lokasi penghasil garam. Dengan penerapan teknologi tunnel garam dapat membantu petani untuk tetap berproduksi meski sedang hujan pada Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- c. Perlu kegiatan Koordinasi dengan pihak kabupaten/kota dan penyuluh untuk usulan kelompok nelayan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan
- d. Perlu kegiatan penguatan kelompok dengan penerapan inovasi teknologi penangkapan ikan yang modern dan ramah lingkungan sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas hasil tangkapan

#### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi. Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.2. (T-C.30) sebagai berikut:





**Tabel 2.2**  
**(Tabel T-C 30, sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2021	Tahun (n-1) 2022	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024	Tahun (n-2) 2023	Tahun (n-1) 2024	Tahun (n) 2025	Tahun (n+1) 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Produksi Garam Rakyat (ton)		48.450	46.500	47.500	48.450	-	.1155.2	47.500*	48.450	-	
2	Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan (%)		100	50.17	74.08	100	-	28.28	74.08	100	-	
3	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)		67,31	67,29	67,30	67,31	-	67,29	67,30	67,31	-	
4	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)		9.210,12	8.852,48	9.029,52	9.210,12	-	10.742.8	9.029,52 M	9.210,12 M	-	
5	Produksi Perikanan Tangkap (ton)		413.030,8	396.992,3	404.932,2	413.030,8	-	429.431,2	404.932,2	413.030,8	-	
6	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)		30,25	23,89	27,07	30,25	-	18.47	27,07	30,25	-	
7	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)		78,95	57,89	68,42	78,95	-	63.16	68,42	78,95	-	
8	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%)		27,17	25,61	26,79	27,17	-	18.11	26,79	27,17	-	
9	Nilai produksi perikanan budidaya (Rp.M)		15.958,39	14.474,73	15.198,47	15.958,39	-	17.944.4	15.198,47 M	15.958,39 M	-	
10	Produksi perikanan budidaya (ton)		4.298.391,1	3.898.767,4	4.093.705,8	4.298.391,1	-	4.298.391,1	4.093.705,8	4.298.391,1	-	
11	Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)		100	100	100	100	-	100	100	100	-	
12	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)		89,85	87,48	88,73	89,85	-	69.18	88,73	89,85	-	
13	Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi (Rp.M)		317.28	304.96	311,06	317.28	-	280.30	311,06 M	317.28 M	-	
14	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi (Ton)		5.544,1	5.329,0	5.436,2	5.544,1	-	5.497.4	5.436,2	5.544,1	-	
15	Persentase Pembinaan mutu produk perikanan (%)		100	60	80	100	-	60	80	100	-	

Sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum bahwa Perangkat Daerah yang termasukb Urusan Pemerintahan Wajib yang melaksanakan pelayanan dasar sesuai pasal 3 sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah yang masuk dalam Urusan Pilihan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang termuat dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Sehingga ditetapkan kinerja pelayanan dan penetapan Kinerja dalam suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi garam yaitu melalui pelayanan peningkatan kualitas dan mutu produk garam berupa :
- b. Memberikan pelayanan keterangan dalam rangka persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut bagi kegiatan /usaha di pesisir dan laut.
- c. Memberikan pelayanan dalam rangka Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan yaitu pelayanan kebutuhan petambak garam dalam peningkatan produksi dengan mengidentifikasi usulan petambak garam.
- d. Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap melalui fasilitasi usaha dan pembinaan kelompok yaitu berupa :
  - a. Memberikan pelayanan Rekomendasi/keterangan Izin Usaha, NIB dan dokumen kapal
  - b. Memberikan pelayanan Rekomendasi dalam rangka penerbitan izin usaha Perikanan tangkap dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 1.004 unit usaha.
- e. Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya melalui fasilitasi usaha dan pembinaan kelompok yaitu berupa :
  - a. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan yang Baik (CBIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak , pada triwulan II sudah melakukan pelayanan sebanyak 202 surat rekomendasi
  - b. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 26 surat rekomendasi
- f. Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya melalui fasilitasi usaha dan pembinaan kelompok yaitu berupa
  - a. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor Produk Perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 2 unit pengolahan ikan.

- b. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor induk udang vanname dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 4 unit dengan jumlah impor induk udang sebanyak 16.000 pasang induk dan ikan koi/mas/koki 15.000 ekor.
- c. Produksi Benih Ikan Air Tawar  
Tahun 2023 sebanyak 5.304.000 Ekor berukuran 1-3 cm dengan perincian ikan mas : 3.902.500 ekor dan ikan nila : 1.401.500 ekor.
- d. Produksi Benur Air Payau  
Tahun 2023 sebanyak 15.098.000 ekor jenis windu dengan uraian sebanyak 11.348.000 ekor menjadi sumber PAD dengan penjualan sebesar Rp. 306.396.000,- dan untuk bantuan ke masyarakat sebesar 3.750.000 ekor.
- e. Memberikan pelayanan rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap
- g. Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan dan peningkatan Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi
  - a. Melakukan pengujian mutu hasil perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 5.951 unit
  - b. Memberikan rekomendasi ijin usaha perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 2.151 unit
- h. Memberikan pelayanan rekomendasi persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ruang kawasan konservasi dan perairan dan pembinaan peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan ekosistem laut.
  - KKPRL terbit di Sulsel untuk semester 1 tahun 2024 sebanyak 16 unit
  - Penilaian Teknis yg Dilakukan selama 2024 sebanyak 18 penilaian
  - Proses pengembalian ada 2 permohonan

Adanya perubahan kebijakan menyebabkan beberapa program pemerintah mengalami transisi perencanaan sehingga dalam rangka efisiensi anggaran dilakukan refocusing/rasionalisasi belanja pada kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak melaju sesuai dengan agenda karena adanya reformasi pada program pemerintah dimana perangkat daerah harus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan perubahan metode penganggaran sehingga turut mempengaruhi pencapaian kinerja program kegiatan yang masih di bawah target.

Selain itu dalam pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang tidak tepat dan belum terukur secara jelas kinerjanya sehingga diperlukan perbaikan/perubahan rencana kerja dan perubahan rencana strategis.

### Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada bagian ini juga disajikan capaian kinerja IKU pada pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 s/d 2023 sebagaimana tabel berikut ini (terlampir). Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dan Implikasi capaian IKU terhadap Renstra 2018 -2023 maka Evaluasi Capaian Renstra yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dengan sasaran sebagai berikut :

#### a. Sasaran :

##### **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan**

Pada sasaran ini terdapat 3 indikator kinerja yaitu persentase nilai Sakip Perangkat Daerah, persentase capaian kinerja program perangkat daerah dan persentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti.

**Tabel 2.3**  
**Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2022	2023	2022	2023*	2022	2023*	
1.1	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perangkat daerah	Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	86.02	86.21	83.78*	86.21*	97,39	99.75*	Data tahun 2021 dan 2022 adalah data proyeksi
		Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	98	98.5	110.47	111*	112.72	112.79*	
		Persentase Nilai temuan Material LHP yang ditindaklanjuti	82	100	100	100*	100	100*	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						106,36	106.26	Predikat sangat baik

Untuk mencapai sasaran diatas maka terdapat 2 strategi yaitu 1) penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pengelolaan 2) ketersediaan dukungan operasional kegiatan . Program kegiatan yang dominan terhadap pencapaian sasaran tersebut yaitu program

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama yang terkait dengan peningkatan kontribusi sektor perikanan adalah seperti pada tabel 2.3. Berdasarkan data diatas persentase capaian terhadap Rencana Kerja tahun 2023 yaitu persentase Nilai Sakip OPD diharapkan dapat mencapai target, kemudian persentase capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) telah mencapai 108,25 % dan telah mencapai target perencanaan hal ini dipengaruhi oleh beberapa program kegiatan telah melampaui target indikator kinerja. Kemudian % ASN rata-rata memiliki nilai SKP Kategori Baik dimana Integritas dan Komitmen ASN untuk bekerja dan melakukan pelayanan sudah ada peningkatan.

**b. Sasaran :**

**Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas perikanan**

Sasaran ini didukung oleh Program **Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Perikanan Budidaya** yang merupakan program prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikator kinerjanya fokus ketersediaan bahan baku pada hilirisasi produk. Program ini dikembangkan agar terjadi peningkatan produktivitas produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi baik pada pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengembangan usaha garam dan pengembangan usaha pengolahan sampai tahun 2023.

**Tabel 2.4**  
**Sasaran meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2022	2023	2022	2023*	2022	2023	
2.1	Sasaran : Meningkatnya jumlah produksi produktivitas perikanan	Produksi Perikanan (ton)	4.342.259,8	4.546.138	4,500,184,6	-	103,6	-	
		Kontribusi PDRB Perikanan (%)	4,6	5,1	9,4	-	204,4	-	

	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					154		Predikat sangat baik
--	-----------------------------------	--	--	--	--	-----	--	----------------------

Adapun tujuan sasaran adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya. Selain itu komoditas udang, bandeng dan rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan sehingga perlu digalakkan dalam rangka peningkatan produksi budidaya. Peluang pengembangan budidaya dan perikanan tangkap berupa inovasi teknologi yang dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan memfasilitasi pelayanan kepada pembudidaya dan nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan higienisasi sarana prasarana perikanan. Pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep, Maros dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam kapasitas <100 ton, penerapan geomembran.

#### **C. Sasaran :**

##### **Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan**

Tahun 2023 konsumsi ikan meningkat mencapai 70,46 kg/kap dari tahun 2022 yang telah mencapai 56,3 kg/kap dan di tahun 2024 konsumsi ikan di Sulawesi Selatan diharapkan dapat meningkat lagi. Sedangkan pencapaian konsumsi ikan nasional pada tahun 2023 telah mencapai 56,39 kg/kap (Data KKP) menargetkan pencapaian konsumsi ikan untuk tahun 2023 sebesar 59,50 kg/kap dan terealisasi sebesar 68,30 kg/kap . Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Selain itu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan.

**Tabel 2.5**  
**Sasaran meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2022	2023	2022	2023*	2022	2023	
2.2	Sasaran : Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Jumlah konsumsi ikan	59.50	62.7	68.30	-	114.78	-	Data tahun 2023 belum ada
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						114.78		Predikat sangat baik

**d. Sasaran :**

**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan**

Pada tahun 2023 telah diupayakan perbaikan sarana dan prasarana di daerah-daerah pesisir dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pesisir, sehingga kemajuan akses masyarakat yang berada di pulau-pulau dan wilayah pesisir terhadap pembangunan dapat berkembang lebih baik. Perbaikan-perbaikan tersebut meliputi sarana tambatan perahu. Pada tahun 2021 ditargetkan cakupan Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mencapai 40% sampai akhir anggaran tahun 2023. Begitu strategis dan tingginya potensi bahari yang dimiliki Sulawesi Selatan, menjadi hal penting bagaimana daerah ini dapat memberdayakan desa pesisir yang tersebar di beberapa kabupaten/kota sehingga berdampak pada pencapaian Nilai Tukar Nelayan. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN pada tahun 2021 telah mencapai 107,43 diharapkan tahun 2023 dapat mencapai peningkatan.

**Tabel 2.6**  
**Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2022	2023	2022	2023*	2022	2023*	
2.3	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan	NilaiTukar Nelayan (NTN)	102.37	103.19	107.43	109.64*	102.07	105.05*	Data Tahun 2022 adalah data sampai bulan Mei
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						102.7	105.05	Predikat sangat baik



e. **Sasaran :**

**Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan**

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan identifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, identifikasi kawasan konservasi laut, pembudidayaan *mangrove fisheries*, penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum dalam tindak pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Indikator ini didukung dengan Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut dimana dilakukan pengawasan untuk penerapan IUU Fishing sehingga diharapkan proporsi tangkapan ikan dapat mencapai batas yang diijinkan agar sumberdaya ikan tidak berkurang. Demikian juga pada kawasan lindung dan perairan juga dilakukan penataan dan rehabilitasi sehingga rasio kawasan lindung dapat terjaga .

**Tabel 2.7**  
**Sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2022	2023	2022	2023*	2022	2023*	
3.1	Sasaran : Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	1.05	1.07	1.57	1.58*	149.52	147.66*	Data Tahun 2023 adalah data proyeksi
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batas biologis yang aman (%)	35.72	38.58	56.12	-	161.64	-	Data tahun 2023 blm ada
		Persentase penurunan Tindakan IUU Fishing (%)	20.83	26.32	83.33	-	50.01	-	Data tahun 2023 blm ada
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						120.39		Predikat sangat baik

Realisasi presentase rata-rata capaian Indikator Kinerja /IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah 120,39 (**predikat sangat baik**). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

#### **1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan Lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan melalui Forum Perangkat Daerah dan Sinkronisasi Program Kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah maka dengan adanya isu-isu penting maka dapat melengkapi penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya seperti pada proses penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan juga penelaahan terhadap isu daerah dan nasional yang mempengaruhi. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan komprehensif dengan mempertimbangan kondisi eksternal yang ada sebagai dinamika nasional dan regional.

Beberapa isu dan dokumen perencanaan lainnya yang ditelaah, meliputi:

**a. Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Stunting**

Perubahan Iklim menimbulkan masalah yang dihadapi dalam sistem pangan, tidak hanya mengganggu rantai pasokan dan membatasi produksi pangan, tetapi juga menunjukkan berbagai aspek yang bisa mengganggu ketahanan pangan dalam jangka panjang, seperti masalah akses pangan akibat tingkat ketergantungan pasar yang tinggi dan berbagai tantangan logistik, serta masalah akses ekonomi di tengah berkurangnya daya beli masyarakat atas pangan akibat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.

Hal ini memaksa kita untuk mencari cara-cara baru untuk meningkatkan ketahanan sistem pangan. Pada bulan Desember 2023, Ekonomi Laut Berkelanjutan (Ekonomi Biru) menyoroti potensi peran laut dalam mengatasi kerawanan pangan dan malnutrisi serta mengubah sistem pangan untuk meningkatkan ketahanan terhadap goncangan dan perubahan iklim.

1. Kontribusi ikan dan pangan laut sebagai sumber protein dan nutrisi lainnya merupakan bagian penting dari pola makan masyarakat Sulawesi Selatan yang menyumbang 50 persen dari seluruh asupan protein hewani dan berperan sebagai sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat ekonomi lemah. Meskipun ikan menyumbang 50 persen dari total konsumsi protein hewani, data menunjukkan bahwa asupan protein di Indonesia masih termasuk rendah berdasarkan pedoman gizi yang berlaku, terutama dibandingkan dengan konsumsi karbohidrat. Ini menjadi salah satu faktor mengapa negara kita menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang menghadapi dua permasalahan gizi buruk sekaligus, yaitu kurang gizi dan gizi berlebih yang menyebabkan **stunting**. Untuk mengatasi masalah ini, pangan laut dapat menjadi sumber protein, lemak esensial dan nutrisi yang andal untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Dengan kandungan protein yang tinggi, ikan menjadi pilihan sumber protein yang lebih baik dibandingkan daging, dan menyediakan zat gizi mikro (seperti vitamin A, B, D, dll.) yang diperlukan untuk memerangi tingginya angka stunting dan malnutrisi di negara ini.

Selain itu, ikan dapat menjadi sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat ekonomi rendah yang dapat diakses di pasar atau dipanen langsung di wilayah pesisir atau laut.

2. Kontribusi mata pencaharian berkelanjutan. Sektor perikanan masih menjadi sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat nelayan skala kecil, individu dan tradisional. Sekitar 90 persen nelayan di Sulawesi Selatan adalah nelayan skala kecil dan lebih dari 80 persen tangkapan ikan Sulawesi Selatan berasal dari perikanan skala kecil. Nelayan juga masih menjadi salah satu masyarakat termiskin, di mana 2,7 juta nelayan Indonesia termasuk dalam 25 persen dari total masyarakat miskin nasional dan sebagian besar dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Bantuan dari pemerintah yang terbatas bagi nelayan skala kecil dalam agenda perikanan nasional seringkali meninggalkan nelayan skala kecil sehingga mereka tidak dapat keluar dari **kemiskinan**. Menyediakan mata pencaharian bagi nelayan dan meningkatkan kemampuan mereka sangat penting untuk memastikan aksesibilitas dan stabilitas ketahanan pangan bagi satu kelompok populasi yang sangat besar di Indonesia. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperhatikan nelayan perempuan dan perempuan yang bekerja di sektor perikanan.
3. Kontribusi keragaman sumber pangan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan makanan darat. Sulawesi Selatan memiliki potensi untuk mengembangkan pola makan dan mata pencaharian yang lebih beragam melalui **panen dan produksi makanan dari laut**. Budidaya laut (marikultur) di Sulawesi Selatan adalah yang paling produktif dan memiliki potensi untuk mengambil peran penting dalam ketahanan pangan dan gizi, terutama untuk budidaya laut tanpa pakan (seperti rumput laut dan bivalvia). Produksi rumput laut merupakan bagian terbesar dari total produksi akuakultur di Sulawesi Selatan. Seperti organisme budidaya laut lainnya, rumput laut tidak memerlukan pakan tambahan karena mereka mengekstrak sumber makanan dari lingkungan sekitarnya sehingga biaya operasional yang dibutuhkan lebih rendah. Bivalvia laut (seperti, remis, kerang, tiram) juga merupakan sumber makanan yang berprotein tinggi dan terjangkau. Mereka juga membantu membersihkan saluran air di dalam atau ke laut dengan memakan partikel-partikel organik seperti alga berlebih.

#### **b. Lingkungan dan pencemaran laut**

Isu terkait lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang sangat mengemuka belakangan ini. Dalam proses pembangunan, seringkali kepentingan ekonomi dihadapkan dengan kepentingan lingkungan. Permasalahan lingkungan pada dasarnya adalah irisan dari permasalahan yang terjadi pada lingkungan alami (natural environment), lingkungan buatan (man-made environment) terkait aktivitas perekonomian, dan lingkungan sosial (social environment). Oleh sebab itu, penanganan permasalahan lingkungan harus dilaksanakan secara bersama sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kondisi ekonomi dan yang dilakukan di Sulawesi Selatan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan di Sulawesi Selatan ditandai dengan terlampauinya daya dukung dan daya lingkungan. Saat ini yang menjadi perhatian degradasi penurunan kualitas air dan penurunan kualitas udara yang diakibatkan oleh meningkatnya emisi kendaraan bermotor, emisi cerobong, dan emisi pembakaran sampah oleh masyarakat. Meningkatnya frekuensi dan risiko bencana di Sulawesi Selatan sangat berkaitan dengan meningkatnya kerusakan lahan yang diakibatkan oleh berkurangnya tutupan vegetasi dan meningkatnya luas lahan kritis. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam berlebihan, meningkatnya kerusakan habitat tanaman dan satwa langka, dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, menyebabkan tingginya kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Berkaitan dengan isu perubahan iklim yang telah berkembang menjadi isu global dan nasional, tingginya emisi gas rumah kaca diyakini secara ilmiah menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Indonesia berkomitmen untuk turut berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menetapkan target sebesar 29% melalui pendanaan dan 41% dengan tambahan pendanaan dari dukungan internasional pada Tahun 2030. Hal ini ditegaskan dengan diratifikasinya Paris Agreement melalui penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-

Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Sebelumnya, Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Sulawesi Selatan

**c. Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2016-2030, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan 59 ersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan 59ersam masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun dari 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan didukung oleh sektor Kelautan dan Perikanan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

**d. Transformasi Digital**

Digitalisasi terus berkembang pesat di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, baik pada tingkat global, nasional, maupun lokal. Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, di seluruh provinsi di Indonesia, secara rata-rata 44,5% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Sementara itu, di Sulawesi Selatan sendiri, secara rata-rata 43,91% penduduk merupakan pengguna internet. Lebih jauh, sektor telekomunikasi di Sulsel tumbuh 6,4% pada tahun 2021. Digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat diharapkan bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui optimalisasi teknologi tepat guna sehingga bisa meningkatkan produktivitas lapangan usaha, penyediaan akses informasi secara cepat dan efektif sehingga bisa menurunkan biaya transaksi, maupun pembukaan akses informasi dan pemasaran sehingga para pelaku usaha, termasuk UMKM, bisa terintegrasi dengan pasar global. Namun demikian, adopsi digital oleh lapangan usaha belum secepat yang diharapkan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah adanya Isu strategis dan permasalahan pada sektor kelautan dan Perikanan yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 1) pengelolaan perikanan (fisheries management); 2) penegakan hukum (law enforcement); dan 3) pelaku usaha perikanan 4) Hilirisasi hasil perikanan. Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan Hal ini telah diindikasikan dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Sulawesi Selatan

Sebagai contoh untuk perikanan tangkap, banyak perairan laut di kawasan barat dan tengah Indonesia sudah menunjukkan gejala padat tangkap (overfishing), seperti Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone. Akibatnya, pada daerah-daerah penangkapan ikan tertentu yang mengalami over-exploitation, nelayan-nelayannya umumnya menjadi miskin, karena sulit mendapatkan ikan hasil tangkapan. Selain itu pula, sangat rawan terjadinya konflik antar nelayan di perairan tersebut. Disisi lain, pada daerah-daerah penangkapan ikan yang tingkat pemanfaatannya belum optimal atau underfishing, sumber daya ikan yang bernilai tersebut terkesan dibuang begitu saja, bahkan di beberapa perairan, yang memanfaatkannya adalah kapal-kapal perikanan illegal dari negara lain.

Untuk contoh perikanan budidaya, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan nasional akan benih dan pakan seringkali tidak mencukupi, sehingga aktivitas perikanan budidaya, sebagian masih tergantung dengan negara lain yang tentunya akan mengancam keberlanjutan usaha para pembudidaya ikan nasional. Kenyataan seperti tersebut di atas sebagai cerminan bahwa betapa belum kuatnya pengelolaan perikanan nasional, sehingga pemerintah perlu segera menata dan memperbaiki kelemahan yang ada sekarang dengan melakukan penguatan kebijakannya.

Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan terutama di Sulawesi Selatan juga relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang perikanan ini, selain mengakibatkan kerugian negara, baik secara ekonomi dan lingkungan, juga berdampak pada penegakan kedaulatan wilayah negara, sehingga dapat mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi tidak berdaulat di negaranya sendiri. Contoh utama akibat belum tegaknya hukum di bidang perikanan tangkap adalah maraknya kegiatan IUU fishing yang jelas-jelas menjadi kendala utama untuk mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan. Sementara di bidang perikanan budidaya adalah masalah peraturan tata ruang yang sering kali dilanggar atau tidak dipatuhi tanpa ada tindakan yang tegas dari pemerintah atau aparat penegak hukum. Bahkan tidak sedikit aturan tata ruang diganti atau disesuaikan dengan kepentingan pribadi atau kelompok penguasa. Isu strategis lainnya adalah pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak (*economy of scale*). Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, yang melakukan praktik-praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan, bahkan beberapa masih ada yang menggunakan alat tangkap atau bahan-bahan yang berbahaya bagi sumber daya ikan, lingkungan, dan manusianya. Terlebih lagi ditambah dengan skala usaha ekonomi mereka yang belum layak, sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut lebih cenderung untuk mengejar kuantitas produksi semata, tanpa memperhatikan daya dukung ekosistemnya.



Produk perikanan yang dihasilkan pelaku usaha perikanan dirasa masih sulit menembus pasar karena kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi masih belum stabil. Volume produksi masih dapat dioptimalkan dengan meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas di bidang manajemen, akses terhadap informasi pasar, akses permodalan, teknologi dan sumberdaya manusia (SDM).

#### **e. Permasalahan Internal Organisasi**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan. Lingkungan strategis mencakup berbagai faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan dinamika sosial-politik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan kelautan dan perikanan kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, diantaranya adalah :

1. Bergesernya proses pengadaan barang dan jasa, tender/lelang sehingga pelaksanaan kegiatan tidak selesai tepat waktu;
2. Kebutuhan Bahan Bakar untuk operasional kegiatan baik darat maupun di laut terbatas karena anggaran tidak tersedia akibat refocusing anggaran;
3. Pendampingan dan pembinaan pada masyarakat terbatas karena tidak tersedianya anggaran;
4. Unit kerja masih belum memahami pencapaian indikator kinerja sehingga masih terdapat target indikator yang belum tercapai;
5. Unit kerja belum memahami target indikator yang berdampak hasil (outcomes) sehingga penerapan kebijakan pemerintah yaitu Quick Wins (perubahan yang terjadi pada masyarakat) belum sepenuhnya tercapai.

Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah: - Kurangnya kegiatan yang sifatnya padat karya, penguatan iklim investasi dalam menghadapi pasar baik local maupun global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Selain itu Adapun dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2004 mempedomani NSPK dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan belum termasuk Perangkat Daerah yang memiliki SPM namun dalam penyelenggaraan pelayanan tetap melaksanakan kinerja pelayanan dan mendukung tujuan pembangunan SDGs. Adapun pencapaian program internasional yang didukung oleh sektor kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Evaluasi Pencapaian SDGs Sektor Kelautan

Kode Indikator	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Target TPB/SDGs						Capaian TPB/SDGs						OPD Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022 (Proyeksi)	2023 (Proyeksi)	
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	87%	87%	-	82,4	86,88	87,48	88,73	89,85	54,8	50,13	66,4	69,18	88,70	99,87	Dinas kelautan dan perikanan
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil		2 regulasi	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	Dinas kelautan dan perikanan
14.b.1.(a)	Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan		19 kab/kota	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	Dinas kelautan dan perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi (Orang)	500.000	197.253					39.451	78.902	23.814	37.811	11.587	11.827	12.027	12.250	Dinas Kelautan dan Perikanan

c.

Pencapaian target indikator SDGs yaitu :

1. Persentase kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2022 sebesar 69.18 % masih belum mencapai target sebesar 87.48 namun diupayakan pada tahun 2023 telah mencapai target akhir Renstra.
2. Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil pada tahun 2022 ditetapkan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Sumberdaya Ikan tanggal 9 Juni 2020;
3. Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 19 kabupaten/kota memiliki hak akses dalam permodalan dan pendanaan untuk pengembangan usaha seperti KUR dan Jaminan dalam berusaha melalui pelayanan kartu KUSUKA;
4. Jumlah nelayan yang terlindungi (Orang) yaitu nelayan mendapatkan jaminan asuransi dalam melakukan usahanya dimana pada tahun 2022 sebanyak 11.827 orang dan pada diupayakan tahun 2023 dapat mencapai target

#### **4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah**

Adapun Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

##### **a. Peluang**

Secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah situasi pertumbuhan ekonomi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara pusat dengan kabupaten/kota dan mitra usaha, sehingga secara harmonisasi dapat mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan.

##### **b. Tantangan**

- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

- Kurangnya literasi baik pemerintah maupun masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

**5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan**

Adanya peluang dan tantangan tersebut maka dapat diformulasikan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Sehingga jika dikaitkan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan maka dapat dipetakan sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Pemetaan Isu Strategis dan Rekomendasi Kebijakan**

<b>Isu Strategis Nasional</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<b>Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Stunting</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan</li> <li>3. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>4. Tingginya angka stunting</li> </ol>	Pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan ekonomi local	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan hasil produksi perikanan</li> <li>• Peningkatan bantuan sarana dan prasarana</li> <li>• Pengembangan sektor unggulan sesuai dengan permintaan pasar</li> </ul>
<b>Perubahan Iklim</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih tingginya ketimpangan Pendapatan Masyarakat</li> <li>2. Belum Optimalnya Pengelolaan SDA</li> </ol>	Pengembangan sektor Kelautan dan perikanan yang mandiri, inovatif, berdayasaing dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang inovatif akan teknologi</li> <li>• Pengembangan potensi perikanan dan kelautan berbasis wilayah dan berkelanjutan</li> <li>• Peningkatan usaha alternatif minat masyarakat pesisir</li> <li>• Penerapan pola Kemitraan usaha perikanan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan manajemen dan kinerja pelaku Usaha perikanan (Aparatur Sipil Daerah dan Masyarakat pelaku usaha perikanan)</li> </ul>
<b>Lingkungan dan Pencemaran Laut</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencemaran Sampah Plastik</li> <li>2. Pencemaran limbah kapal di laut</li> <li>3. Pencemaran Limbah organik</li> <li>4. Mitigasi bencana Belum Optimal</li> </ol>	<b>Kebijakan dalam pengawasan, Pengendalian, Pembinaan dan edukasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dengan mengefektifkan Bank Sampah</li> <li>• Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya plastik dan pentingnya daur ulang.</li> <li>• Pelarangan penggunaan bahan kimia beracun dan meningkatkan pengolahan limbah industri.</li> <li>• Perlindungan dan restorasi habitat pesisir seperti mangrove dan terumbu karang serta mengadopsi energi terbarukan untuk mengurangi emisi.</li> </ul>
<b>SDGs</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal</b>	<b>Pengembangan sumberdaya kelautan merujuk kebijakan pemerintah dan kelembagaan masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kelembagaan masyarakat usaha perikanan</li> <li>• Pengembangan potensi pelabuhan perikanan</li> <li>• Pengembangan potensi industri maritim</li> <li>• Restrukturisasi armada perikanan tangkap</li> <li>• Pengembangan informasi dan jaringan pasar</li> </ul>
<b>Transformasi Digital</b>	<b>Masih rendahnya keterampilan Angkatan Kerja</b>	<b>Pengembangan inovasi sarana dan prasarana usaha perikanan berbasis masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas SDM masyarakat pesisir dan pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>• Penerapan inovasi sarana prasarana usaha perikanan</li> <li>• Penerapan teknologi yang adaptif dan inovatif dalam pengembangan usaha perikanan</li> </ul>

Internal Organisasi	Rendahnya capaian realisasi program kegiatan	Penataan dan penerapan manajemen organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan <b>metode Sistem Kerja</b></li> <li>• <b>Penyusunan Proses Bisnis</b></li> <li>• Melakukan analisis <i>Critical Succes Factor</i> (CSF)</li> </ul>
---------------------	--	---	---

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

##### 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 merupakan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam membangun sinergitas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya guna mewujudkan pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Arah kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari tahapan pembangunan lima tahun keempat dari RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025, yang difokuskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan yang berkeadilan dan mengatasi efek pertumbuhan pada tahapan sebelumnya yang menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi antar lapisan dan antar wilayah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2025 maka berdasarkan RPD 2024-2026 dan arahan kebijakan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yaitu :

Tabel 2.11

**Misi dan Kebijakan Prioritas RKPD Tahun 2025 dengan mengacu RPJPD  
Sulawesi Selatan (periode kelima 2005-2025)**

Misi ke		Kebijakan Prioritas (2020-2025)	Kebijakan Pj. Gubernur tahun
4	Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan social ekonomi yang berkeadilan	1. Penajaman implementasi program pada kabupaten/kota yang angka kemiskinannya paling tinggi;	Tematik Penanganan Kemiskinan
		2. Pelibatan multipihak dalam penanganan keamanan pangan	Tematik Ketahanan Pangan dan Penanganan stunting
		3. Penguatan akses pasar dengan daya saing harga yang tinggi bagi produk petani, peternak dan nelayan	Tematik Pengendalian Inflasi
		4. Hilirisasi produk unggulan untuk pengembangan industri strategis;	Tematik Pengendalian Inflasi
		5. Fasilitasi dan kordinasi antar kabupaten/kota dalam pemeliharaan dan pemulihan kondisi ekologis daerah aliran sungai serta danau dan kawasan pesisir;	Tematik Ketahanan Pangan
5	Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional	1. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang diarahkan untuk mendukung ketahanan sosialekonomi masyarakat pada pulau-pulau di Sulawesi Selatan;	Tematik Ketahanan Pangan

Alasan penjelasan proses dilaksanakan di tahun 2025, dimana seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun ini juga dilakukan review RPJMD 2018-2023 guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespons perubahan

lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya. Oleh karena itu Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Untuk tahun 2025 fokus pada ketahanan pangan dan pengendalian inflasi , penanganan kemiskinan, penanganan stunting dan pengendalian inflasi. Arahkan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan menjadi satu kesatuan yang diarahkan pada pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat. Kualitas pertumbuhan merupakan pertumbuhan yang mengedepankan unsur pemerataan yang berkeadilan, sedangkan pemerataan pembangunan pada semua sektor pembangunan di kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki setiap daerah; **Kualitas pertumbuhan** diarahkan pada pertumbuhan sektor unggulan, yang dipicu oleh meningkatnya nilai tambah pengelolaan SDA khususnya pada sektor perikanan dan industri pengolahan, diharapkan memicu pertumbuhan sektor unggulan lainnya. Untuk meningkatkan nilai tambah dalam proses produksi barang dan jasa dibutuhkan dukungan investasi; **Optimalisasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan** menekankan pada kelestarian lingkungan hidup, berwawasan lingkungan, dan ramah lingkungan.
- b. Bentuk amanah yang tertuang dalam Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025 untuk sektor Perikanan terdapat **program Prioritas** :
  1. Tematik Penanganan Kemiskinan
    - a. Pengembangan Rumah Ikan dan Terumbu Buatan
    - b. Pengembangan Kolam Terpal Budidaya Ikan Air Tawar
    - c. Pengembangan komoditas unggulan Rumput Laut dan komoditas lainnya yang bernilai ekonomis
  2. Tematik Penurunan Stunting
    - Dukungan peningkatan kompetensi dan pengujian mutu produk hasil perikanan, dan sertifikasi produk untuk mendukung ekspor hasil perikanan Sulsel
    - Pameran dan Promosi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Nasional/Daerah
  3. Tematik Pengendalian Inflasi
    - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
    - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
  4. Tematik Ketahanan Pangan
    - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien
    - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut



- Penjaminan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Tersedia dan beroperasinya kendaraan berpendingin Untuk Mendukung Kualitas dan daya saing produk perikanan)
- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil

**5. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD**

Agar Rencana program kegiatan lebih terarah dan konsisten terhadap dokumen RPJMD/RPD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 maka review rancangan awal disajikan dalam bentuk tabel 2.9 atau Tabel C-31 sesuai lampiran permendagri 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan :

- Indikator pada program kegiatan agar lebih tajam dan tepat sasaran terutama pada program teknis.
- Penetapan pagu per kegiatan harus memperhatikan target indikator jika pagu berkurang maka dilakukan penyesuaian target indikator, perubahan lokasi dan kelompok sasaran.
- Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan

Oleh karena itu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda dan Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31

**Tabel 2.11**  
**(Tabel T-C 31, sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)**

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan**

**Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

**Lembar 1 dari**

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL AWAL KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				93.757.689.961,33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				172.247.099.578	
3	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	99,55 % 95 % 100 %	35.285.721.190	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 % 60 % 100 %	42.265.576.058	1
3	2	011	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	9 Dokumen	1.026.268.500	Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	9 Dokumen	2.140.582.970	
3	2	01	1.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	234.860.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.279.888.270	
3	2	01	1.	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	12.00.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	48 Dokumen	24.028.300	

3	2 5	01	1. 01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	28.708.600	
3	2 5	01	1. 01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.708.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17.918.000	
3	2 5	01	1. 01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	28.673.500	
3	2 5	01	1. 01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	292.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	16.214.300	
3	2 5	01	1. 01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	425.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	17.918.000	
3	2 5	011 .0	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	45 Laporan	<b>24.111.487.851</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	<b>45 Laporan</b>	<b>24.758.746.896</b>	
3	2 5	01	1. 02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189 Orang/ Bulan	24.006.787.851	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	209 Orang/ Bulan	24.608.721.896	

3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	16.407.200	
3	25	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.700.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.529.800	
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.405.000	
3	25	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	27.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	35.770.000	
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SK dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	64.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SK dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	87.913.000	
3	25	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	

3	25	011.0	3		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	53 Laporan	49.600.000	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	1 Laporan	63.810.700	
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.690.700	
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	54.660.000	
3	25	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	6.460.000	
3	25	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	
3	25	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	

3	2 5	011 .0	4		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah perangkat daerah	Laporan 2	0	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah perangkat daerah	<b>1 Laporan</b>	<b>30.040.000</b>	
3	2 5	01	1. 0 4	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	30.040.000	
3	2 5	01	1. 0 4	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0	Analisa dan Pengembanga n Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0	
3	2 5	011 .0	5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah layanan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 persen	<b>23,288</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah layanan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	<b>100 persen</b>	<b>484.248.200</b>	
3	2 5	01	1. 05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	23.780.000	
3	2 5	01	1. 05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	209 Paket	39,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	209 Paket	333.610.000	
3	2 5	01	1. 05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	79,041	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.246.000	
3	2 5	01	1. 05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	20,297	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.202.400	

3	2 5	01	1. 05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	34,950	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	57.090.700	
3	2 5	01	1. 05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	50,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	
3	2 5	01	1. 05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	120 Orang	58.319.100	
3	2 5	01	1. 05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0 Orang	0	
3	2 5	011 .0	6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah layanan administrasi administrasi umum perangkat daerah	sen 100	<b>344,770</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah layanan administrasi administrasi umum perangkat daerah	<b>100 persen</b>	<b>1.907.494.830</b>	
3	2 5	01	1. 0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	25,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	30.647.600	
3	2 5	01	1. 0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	62,020	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	826.939.030	
3	2 5	01	1. 0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	25,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	93.555.000	

3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	32,750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	104.102.900	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.735.500	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	698.245.800	
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.269.000	
3	25	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	
3	25	011.0	7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Unit	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Unit	153.102.360	
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	



3	2 5	01	1. 07	05	Pengadaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	0	Pengadaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	53.102.360	
3	2 5	01	1. 07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	
3	2 5	01	1. 07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
3	2 5	01	1. 07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
3	2 5	011 .0	8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	250,000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	4,717,482,391	
3	2 5	01	1. 0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	
3	2 5	01	1. 0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,323,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.459.372.135	

3	2 5	01	1. 0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	50,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	
3	2 5	01	1. 0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,764,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.710.395.644	
3	2 5	011 .0	9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Unit	5,363,750	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	30 Unit	3.290.346.331	
3	2 5	01	1. 0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	28,113,75	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	1.977.276.531	
3	2 5	01	1. 0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	55,125	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	133.169.800	
3	2 5	01	1. 0 9	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	55,125	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50,000,000	

3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.129.900.000	
3	25	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	
3	25	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	
3	25	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikananCakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutanJumlah produksi garam rakyat	<b>100% 67,31% 48.450Ton</b>	<b>12,259,495,4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikananCakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Jumlah produksi garam rakyat	<b>100% 67,31% 48.450Ton</b>	<b>11,969,196,200</b>	
3	25	02.1.0	1		<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>		Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	<b>55 Ha 21 Unit</b>	<b>10,772,695,4</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>		Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	<b>56,45 Ha 21 Unit</b>	<b>11.642.290.100</b>	

3	2 5	02	1. 01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1038850.36 Ha	551,250	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1038850.36 Ha	692.365.000	
3	2 5	02	1. 01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	56.45 Ha	12,789,000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	56.45 Ha	10.028.792.100	

3	2 5	02 1.0	2		<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>		Jumlah dokumen teknis pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	Rekomen dasi	53,550,000	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>		Jumlah dokumen teknis pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	<b>Dokumen Rekomendasi</b>	1,830,000	
3	2 5	02	1. 02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Rekomendas i	10,500	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	o Rekomendasi	o	
3	2 5	02	1. 02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	4 Rekomendas i	12,600	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	4 Rekomendasi	1,830,000	
3	2 5	02	1. 02	03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	4 Rekomendas i	12,600	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	o Rekomendasi	o	
3	2 5	02	1. 02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	4 Rekomendas i	12,600	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	o Rekomendasi	o	

3	2 5	02	1. 02	05	Pencatatan dan Pengadministrasi an Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	5,250	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	0 Dokumen	0	
3	2 5	02 1.0	3		<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>		Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	Unit	<b>3,250,000</b>	<b>Pemberdayaa n Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>		Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	<b>24 Unit</b>	<b>919,303,000</b>	
3	2 5	02	1. 03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	75,000	Pengembanga n Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	218.610.000	

3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10 Kelompok	0	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. b. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. b. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. b. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. b. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10 Kelompok	673.050.000	
3	25	02	1.03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	75,000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	27,643,000	

3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		Cakupan bina kelompok nelayanJumlah produksi perikanan tangkapNilai Hilirisasi Produksi Perikanan TangkapPersentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasionalPersentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%TonRp. Milyar%%	29,984,973,229	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		Cakupan bina kelompok nelayanJumlah produksi perikanan tangkapNilai Hilirisasi Produksi Perikanan TangkapPersentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasionalPersentase Produksi perikanan kelompok nelayan	<b>67,31% 413.030,8 Ton Rp. 9.210,12 M 78,95% 27,17%</b>	36.133.269.400	
3	25	03 1.0	1		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	<b>102,000,000</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	<b>287 Unit</b>	<b>15,523,425,000</b>	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	o Dokumen	o	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	o Dokumen	o	



3	2 5	03	1. 01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan,	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		14,847,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Pinrang,	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	17 unit	7.411.690.000	
---	--------	----	----------	----	---	--	--	--	------------	--	--	--	---------	---------------	--

						Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Palopo, Semua KelurahanKab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKo ta Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKo ta Palopo, Sem ua KelurahanKa b. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

3	25	03	1 . 0 1 0 3			Penjaminan Ketersediaan SaranaUsaha Perikanan Tangkap	Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan,			3,150,000	Penjaminan Ketersediaan SaranaUsaha Perikanan Tangkap	Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Pangkajene Kepulauan,		510 unit	4.638.953.000	
---	----	----	----------------------------	--	--	---	--	--	--	-----------	---	--	--	----------	---------------	--

						SemuaKelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Palopo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					SemuaKelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKo ta Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKo ta Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKo ta Palopo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	2 5	03 1.0	2		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan	Unit	0	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan	15 Unit	207.004.500	
3	2 5	03	1. 02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Peraliran Darat	0 Dokumen	0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Peraliran Darat	0 Dokumen	0	
3	2 5	03	1. 02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Peraliran Darat	0 Unit	0	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Peraliran Darat	0 Unit	0	

3	2 5	03	1. 02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Peraliran Darat	o Unit	o	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Gowa, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Peraliran Darat	15 Unit	207.004.500	
3	2 5	03 1.0	3		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi i	52,500	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Rekomendasi	18.389.800	
3	2 5	03	1. 03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	o Dokumen	o	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	o Dokumen	o	

									sampai dengan 30 GT						
3	2 5	03	1. 03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	0 Rekomendas	0	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	100 Rekomendasi	18.389.000	
3	2 5	03	1. 03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Dokumen	0	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Dokumen	0	
3	2 5	03 1.0	4		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil</b>		Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	rekomend asi	57,750,000	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil</b>		Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	0 rekomendasi	0	
3	2 5	03	1. 0 4	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0	

3	2 5	03	1. 0 4	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	150 Rekomendas	50,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	o Rekomendasi	o	
3	2 5	03 1.0	5		<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah Tanda Daftar Kapal yang telah diterbitkan	Laporan 12	625,000	<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah Tanda Daftar Kapal yang telah diterbitkan	<b>o Laporan</b>	o	
3	2 5	03	1. 05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	50,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	o Dokumen	o	
3	2 5	03	1. 05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	125 Dokumen	75,000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	o Dokumen	o	



3	25	031.0	6		<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	Unit	10,792,398,2	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	5 Unit	23.857.232.100	
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	unit	109,623,2	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	5 Lokasi	51.000.000	
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	9,900,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Pelabuhan Perikanan	23.634.011.500	
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	75,000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	172.220.600	
3	25	031.0	7		<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		Jumlah rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	rekomendasi	26,250,	<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		Jumlah rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	0 rekomendasi	0	
3	25	03	1.07	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi	1 Dokumen	5,250	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi	0 Dokumen	0	

						Kewenangan Provinsi			10 GT sampai dengan 30 GT		Kewenangan Provinsi			
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	5,000	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0
3	25	03.1.0	8		<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangk Ikan & Kapal Pengangkut dgn Ukuran Sampai dgn di Laut,Sungai,Danau ,Waduk dan Genangan air lainnya dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	2 Rekomendasi	5,000	<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangk Ikan & Kapal Pengangkut dgn Ukuran Sampai dgn di Laut,Sungai,Danau, Waduk dan Genangan air lainnya dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	0 Rekomendasi	0
3	25	03	1.08	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	5,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0

									sampai dengan 10 GT						
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Rekomendasi	0	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Rekomendasi	0	
3	25	03 1.0	9		<b>Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	10 laporan	50,000	<b>Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	0 Laporan	0	
3	25	03	1.09	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	50,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0	
3	25	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	
3	25	03 1.1	0		<b>Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan</b>		Jumlah laporan pendaftar Perikanan Berukuran Sam Dengan 10 GT yang Berop Laut,Sungai,danau, waduk, Genangan air Lainnya Dap	0 Laporan	0,000	<b>Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai,</b>		Jumlah laporan pendaftar Perikanan Berukuran Sam Dengan 10 GT yang Berop Laut,Sungai,danau, waduk, Genangan air Lainnya Dap	0 Laporan	0,000	

					Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi			Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi			
3	25	03	1.10	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	50,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0	
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	
3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya Persentase ketersediaan benur berkualitas	Ton Rp. Milyar Persen	15,894,535	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya Persentase ketersediaan benur berkualitas	4.298.391,1 Ton Rp. 15.958,39 M 100%	7.124.746.500	
3	25	041.0	1		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dal (satu) daerah Provinsi	rekomendasi	63,000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dal (satu) daerah Provinsi	0 rekomendasi	0	

3	2 5	04	1. 01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	50,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	
3	2 5	04	1. 01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	50,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	
3	2 5	04	1. 01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	0 Dokumen	0	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	0 Dokumen	0	
3	2 5	04 1.0	2		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>		Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	10 rekomendasi	15,750	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>		Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	0 rekomendasi	0	
3	2 5	04	1. 02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	50,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	

3	2 5	04	1. 02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendas	0	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendas	0	
3	2 5	04 1.0	3		<b>Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>		Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan	5 rekomendasi	7,350,000	<b>Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>		Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan	0 rekomendasi	0	
3	2 5	04	1. 03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	50,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	
3	2 5	04	1. 03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	
3	2 5	04 <sup>1</sup> .0	4		<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di</b>		Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Di Laut	10 Laporan	750,000	<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil</b>		Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Di Laut	0 Laporan	0	

					Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi			(TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi			
3	2 5	04	1. 0 4	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Rekomendas i	50,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Rekomendasi	0	
3	2 5	04	1. 0 4	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Rekomendas	0	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Rekomendas	0	
3	2 5	04 1.0	5		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>		Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	33,412,500	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>		Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	133 Unit	7.124.746.500	
3	2 5	04	1. 05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	
3	2 5	04	1. 05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	130 Unit	3,585,087,5	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	130 Unit	3.095.477.000	

3	2 5	04	1. 05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	226,012,5	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	50.006.000	
3	2 5	04	1. 05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	13 Dokumen	50,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	13 Dokumen	47.840.000	
3	2 5	04	1. 05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi (laporan)	1 Laporan	62,500	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembudidayaan	30 Orang	49.800.000	
3	2 5	04 1.0	6		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>		Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar	Unit	<b>959,272,500</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>		<b>Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar</b>	<b>150 Unit</b>	<b>4.029.269.500</b>	
3	2 5	04	1. 06	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat Negatifnya Lintas Kabupaten/Kota	18 Unit	72,500	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak	18 Unit	3.371,965.000	



									Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3	2 5	04	1. 0 6	02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1150 unit	10,000,000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 unit	657.304.500

[illegible]

3	2 5	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	89,85%	11,592,522,6	PROGRAM PENGAWASA N SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	89,85 %	4.306.335.000	
3	2 5	05 1.0	1		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Unit usaha	11,371,422,6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	9 Unit usaha	4.268.230.000	
3	2 5	05	1. 01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi (jenis), Jumlah peserta koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian SDKP (orang), Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok), Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok) Jumlah laporan pengawasan terpadu (laporan)	1 jenis, 120 org, 30 kelompok, 1 laporan	109,351,13	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	77.555.100	
3	2 5	05	1. 01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan (unit), Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (unit), Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi [orang]	7 unit, 36 unit, 100 org	11,141,471,48	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	3,363,856,900	

3	2 5	05	1. 01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil yang mendapatkan pengawasan (unit )	1 unit	50,250	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	17.830.000	
3	2 5	05	1. 01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok)	14 Kelompok	70,350	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	30 Kelompok	218.840.000	
3	2 5	05 1.0	2		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Unit	0	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya</b>	<b>2 Unit</b>	<b>38.105.000</b>	
3	2 5	05	1. 02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	50,000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	10,060,000	

3	2 5	05	1. 02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	50,000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	10.860.000	
3	2 5	05	1. 02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	0	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	17.185.000	
3	2 5	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp. Milyar % Ton	2,520,602, 923	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi</b>	Rp. 317,28 M 100 % 5.544.1Ton	1.492.535.500	

3	2 5	06 1.0	1		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	rekomendasi	66,675,000	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	o rekomendasi	o	
3	2 5	06	1. 01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	1 Rekomendasi	50,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	o Rekomendasi	o	
3	2 5	06	1. 01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Rekomendasi	25,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	o Rekomendasi	o	
3	2 5	06	1. 01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	o	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	o Dokumen	o	

									(Satu) Daerah Provinsi					
3	2 5	06 1.0	2		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>		Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Unit usaha	2,390,927,9	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>		Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Unit usaha	1.491.784.100
3	2 5	06	1. 02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		342,326	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		491.784.100

3	2 5	06	1. 02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2,048,601,92	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	1.000.000.000		
3	2 5	06 1.0	3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan	poran 2	0	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan	2 Laporan	751.400
3	2 5	06	1. 03	01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	0	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	351.400
3	2 5	06	1. 03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan	0 Dokumen	0	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan	1 Dokumen	400.000



							Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir			(Satu) Daerah Provinsi		Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir			
TOTAL								110,739,562,70				TOTAL	99,520,388.596		

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan pemangku kepentingan telah disesuaikan dengan isu strategis dan permasalahan yang ada dan memenuhi beberapa indikator yang belum mencapai target. Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan. Berdasarkan Forum OPD terdapat beberapa usulan dari OPD Kabupaten/Kota sehingga dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel .2.5.**  
**(Tabel T-C.32 Sesuai lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PPK</b>		Nilai Hilirisasi produksi garam	<b>Rp.85.94 Milyar</b>	
		Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	<b>1038850.36 Ha</b>	
		Jumlah produksi garam rakyat	<b>99.965 ton</b>	
		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	<b>23,91%</b>	
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi (unit)	21 Unit	
		Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi (Ha)	55 Ha	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur, Maros, Takalar, Pangkep	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	64 Ha	Penanaman Mangrove Dilengkapi dengan Proposal Desa
	Kabupaten Luwu, Wajo, Pangkajene Kepulauan, Maros dan Kota Makassar		0.12 Ha	Usulan Apartemen Ikan agar dilengkapi dengan proosal desa/proposal kelompok
	Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Takalar, Kepulauan Selayar, Maros		0.074 Ha	Usulan Transplantasi Karang /artificial Reef
	Kabupaten Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar		6 Unit	Usulan Pembangunan Tambatan Perahu agar dilengkapi proposal desa
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan (kelompok)		
		Jumlah sarana dan prasarana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		
Sub Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kabupaten Jenpeonto	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	Usulan agar dilengkapi proposal kelompok
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kabupaten Takalar	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	Usulan sarana inovasi usaha garam , agar dilengkapi proposal kelompok
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Selayar	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	Usulan sarana inovasi usaha garam , agar dilengkapi proposal kelompok

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 9.210,12 Milyar	
		Jumlah produksi perikanan tangkap	413.030,8 Ton	
		Cakupan bina kelompok nelayan	30,25%	
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	27,17%	
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	78,95 %	
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Makassar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Maros, Luwu Timur, Bone, Sinjai, Jeneponto			
Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Makassar, Palopo, Kabupaten Barru, Pangkep, Luwu, Maros, Luwu Utara, Takalar, Bone, Barru, Sinjai, Wajo.			
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat di Usahkan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi				
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Soppeng			
Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (unit)		
		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola		
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PPI Macini Baji Kabupaten Pangkajene Kepulauan, PPI Cempae Kota Pare Pare	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit	Usulan fasilitas fungsional Pelabuhan agar disesuaikan dengan dokumen perencanaan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya</b>	<b>Rp. 15.958,39 Milyar</b>	
		<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>4.298.391,1 Ton</b>	
		<b>Persentase ketersediaan benur berkualitas</b>	<b>100%</b>	
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar	150 Unit	
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Pare Pare Kabupaten Maros, Takalar, Soppeng	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Takalar	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Unit	
<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>			<b>133 Unit</b>	

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kabupaten Pangkep, Bone, Jeneponto, Takalar, Luwu Utara, Wajo, Luwu, Palopo, Bantaeng, Maros	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	130 Unit	Sarana Budidaya Rumput Laut
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil				
Sub Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	Usulan berupa sarana pengawasan bagi POKMASWAS, agar dilengkapi dengan proposal kelompok
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan		
		Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi		
		Persentase pengujian mutu produk perikanan		
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdayasaing (unit usaha)		
		Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (unit usaha)		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	Usulan agar dilengkapi proposal kelompok
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kabupaten Takalar, Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	5 Angkatan	Usulan Pertemuan Inovasi Produk Untuk UMKM, Pengadaan Bahan Kimia Pengujian UPT PBAPL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 %	
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	100 %	
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	60%	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar, Kabupaten Barru	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Usulan E Proposal Kelautan dan Perikanan dan Penyediaan Benih UPT PBAPL
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bone, Barru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rehab Gedung Kantor CDK Bosowasi Rehab Kantor UPT PBAPL
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Usulan Roller Blind

Usulan yang telah disampaikan pada Forum OPD untuk kabupaten/kota sebanyak 56 usulan dan Pokok-Pokok Pikiran sebanyak 231 usulan. Usulan ini akan menjadi rancangan awal Rencana Kerja tahun 2025 namun usulan tersebut masih perlu dilengkapi data dukung.

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Gambar 3.1

Kerangka Pikir Tema RKP 2025



Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Pada tahun 2024, sasaran dan arah kebijakan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini. Setiap penggambaran PN mencakup pendahuluan dengan muatan isu strategis/tantangan yang menjadi dasar penentuan sasaran capaian PN, arah kebijakan, serta strategi perwujudan kebijakan terkait. Penjelasan PN dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan

Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP). Adapun identifikasi kebijakan nasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

**Tabel. 3.1.**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Kebijakan Nasional	Keterangan
1.	Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan	Major Project
2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Pesisir	Major Project
3.	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Perbenihan Air Payau dan Tawar	Major Project
4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	Major Project
5.	Peningkatan Daya Saing dan Mutu Produk	Major Project
6.	Penurunan Stunting, Pengarusutamaan Gender dan SDGs (Kemiskinan, Pelestarian dan Pemanfaatan ekosistem lautan)	Kebijakan Nasional – Internasional
7.	Ekonomi Biru	Kebijakan Nasional – Internasional

**Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan**

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.

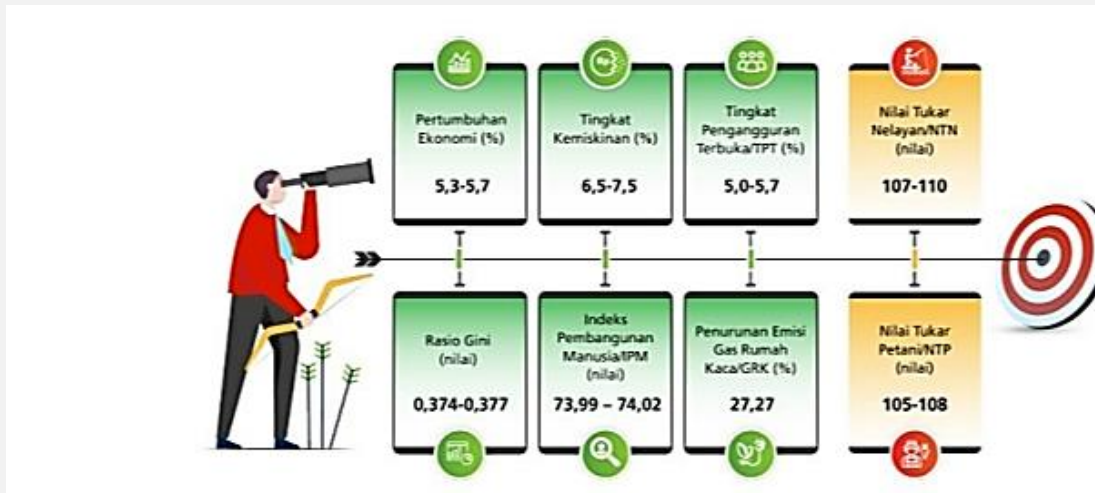
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada akhir periode sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan, maka tema pembangunan RKP Tahun 2025 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024- 2026 dan mengacu pada prioritas nasional RKP Tahun 2025. Adapun tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.1**  
Tema RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2025



**Gambar 3.1**  
Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2025



Sumber Bappenas 2024

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2024 yaitu Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (TATA KELOLA)
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (INFRASTUKTUR)
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PENGEMBANGAN WILAYAH DAN HILIRISASI)
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (SOSIAL EKONOMI)
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (LINGKUNGAN HIDUP)

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2025, maka strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
3. Pengembangan komoditas sektor unggulan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;



4. Peningkatan Pemerataan pembangunan, Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah;
5. Menurunkan kemiskinan;
6. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
7. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah;
8. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
9. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat;
10. Peningkatan peran dan kapasitas perempuan, anak dan disabilitas dalam pembangunan;
11. Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam;
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

**Tabel 3.4**

**Keterkaitan Renja dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 (RKPD 2025)**

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Target 2025	Hasil Pembahasan Rakortek
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/angka	66,16 (B)	67,31 (B)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	2. Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/angka	68,08 (B)	69,52 (B)	
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5,5-6,9	5,3-5,7
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	Tingkat Kemiskinan	%	8,63	6,7-7,7	6,5-7,5
			Nilai Tukar Nelayan	%			

5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	%	1.360.000	1.823.583	27,27
---	--	--	--	---	-----------	-----------	-------

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Perencanaan Strategis Tahun 2024-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai untuk tahun 2025 yaitu :

**Tabel 3.5**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Pendek Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2025**

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025 (Renstra)	TARGET KINERJA Pembahasan RAKORTEK
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi OPD	Huruf/Angka	72,37	
1.1	<b>Sasaran :</b> Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Huruf/Angka	88–90(A)	
a.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Huruf/Angka	99,6	
		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Huruf/Angka	97	
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	100	
2	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor kelautan dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	11,23	
2.1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	10,82	
		Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulsel	%	22,94	
		Produksi Perikanan Konsumsi Ikan	ton kg/Kap/Th	4.875.744,5 73,93	Sesuai
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rupiah	11.960.232.411	
		Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	451.818,7	Sesuai

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025 (Renstra)	TARGET KINERJA Pembahasan RAKORTEK
-1	-2	-3	-4	-4	-5
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	30	
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	31,23	
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%	84,21	
		Nilai produksi perikanan budidaya (Rp.M)	Rp.M	21,850,161,096.30	
		Jumlah Produksi perikanan budidaya (Rp.M)	Ton	4,331,299.70	4.417.925.7
		Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)	%	85	
c.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Produksi garam rakyat	Ton	48,450	105.320
		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	%	78,44	
d.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan (Rp.M)	Rp.M	391.94	
		Produksi olahan ikan (ton)	Ton	6,150.43	
		Persentase pengujian mutu produk perikanan (%)	%	100	
2.2	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	NTUP	Indeks	111,95	
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	NTN	Indeks	111.01	
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	NTPi	Indeks	111.63	
3	Tujuan : Meningkatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan	Potensi penurunan emisi GRK dari sektor perikanan	juta ton CO2	7.351,3	
3.1	Sasaran: Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	99,7	100
		Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola	%	96.78	
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	60,75	

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025 (Renstra)	TARGET KINERJA Pembahasan RAKORTEK
-1	-2	-3	-4	-5	-6
a.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	861,931.17	578.435.53
b.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Unit usaha	89,85	

Agar arah pembangunan terintegrasi dengan **Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan** maka sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 hubungan tujuan dan sasaran saling mendukung dan terkait satu sama lain yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel . 3.3**  
**Hubungan Tujuan dan Sasaran RKPD dengan RENJA Dinas Tahun 2025**

No	RKPD		Renja	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	1.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	1.Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
2	Mengoptimalkan pengelolaan Sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	2.1.Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam	2.Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	2.1.Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah factor produksi dan produktivitas produksi 2.3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana	3.1.Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2.Meningkatkan kelestariandan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	2.1 Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan

Berdasarkan penelaahan permasalahan pada Bab II dilakukan penyesuaian dengan tujuan dan sasaran berdasarkan pemetaan program adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Perumusan Program**

Tujuan	Sasaran	Langkah Strategil	Arah Kebijakan	Program
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas unggulan (udang Windu, Rumput Laut) dan komoditas Perikanan lainnya yang berkelanjutan dan didukung oleh inovasi teknologi dan informasi serta Pembinaan yang Inklusif bagi pelaku usaha untuk mendorong produktivitas serta Revitalisasi Wilayah-wilayah yang pernah menjadi pusat produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis dan berbasis kawasan serta pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global</li> <li>• Pengembangan pola kemitraan usaha untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah produk</li> <li>• Perbaikan sarana dan prasarana produksi perikanan baik pada faktor produksi maupun metode kerja serta Perbaikan standarisasi kualitas produk dari hulu ke hilir</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil</li> <li>2. Program Pengelolaan Perikanan Tangka</li> <li>3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> </ol>
	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan usaha pengolahan Perikanan dan diversifikasi produk dengan inovasi teknologi olahan yang bermutu dan berdayasaing</li> <li>• Fasilitasi dalam pengembangan jejaring dan akses keuangan serta permodalan dalam rangka perluasan usaha dan penguatan pasar</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Hilirisasi Perikanan</li> <li>2. Inovasi Olahan dan penerapan Standarisasi produk dalam rangka peningkatan imun dan penurunan stunting</li> <li>3. Peningkatan volume dan nilai produksi hilirisasi perikanan</li> </ol>	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Penguatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kelautan dan Perikanan	Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan	Sasaran	Langkah Strategil	Arah Kebijakan	Program
Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Pengawasan wilayah laut, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan serta Koordinasi dan kerjasama, pengelolaan serta pengamanan wilayah laut dari pemanfaatan sumberdaya kelautan dan Perikanan	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam rangka penurunan IUU Fishing	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut, pengendalian dan konservasi kawasan pesisir dan laut serta Penataan dan pengelolaan ruang laut	Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
		Peningkatan Pengawasan kolaborasi Multipihak dan penerapan inovasi teknologi informasi pada sektor kelautan dalam menjaga dan mengawasi perairan laut dalam rangka pengendalian dan pengurangan IUU Fishing	Menjaga Ketersediaan stock ikan dan terkendalinya pemanfaatannya SDI yang lestari dan keberlanjutan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi Ekosistem Pesisir dan Laut serta kelestarian lingkungan pesisir dan laut	Pengembangan inovasi teknologi, edu wisata dan eko wisata untuk pengelolaan kawasan konservasi dan daerah perlindungan laut, kelestarian lingkungan serta penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam memelihara Lingkungan pesisir dan Laut	Penataan dan pengelolaan sector kelautan dan perikanan Integrasi terhadap dokumen RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau kecil	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sedangkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selaras dengan sasaran pembangunan jangka pendek tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Dinas Kelautan Dan Perikanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Indikator	Target Capaian Tahun 2024	Formulasi	Pengukuran Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>SS1.1 Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel</b>				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86–88 (A)	Lembar Hasil Evaluasi	Permenpan
<b>SS2.1 Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan</b>				
1	Produksi Perikanan (ton)	4.875.744,5	Produksi Perikanan = Tpt + Tpb (Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya)	BPS
2	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sulsel (%)	10,82	(PDRB perikanan /PDRB Daerah)x100%	BPS
3	Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Ekspor Sulsel (%)	22,94	(Jumlah ekspor hasil perikanan (ton)/Jumlah Ekspor Daerah (ton)) x 100%	BPS
4	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	73,93	AKI = A + B + C dimana A = Konsumsi di Rumah Tangga B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat	BPS
<b>SS2.2 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan</b>				
1	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	111,95	(Indeks yang diterima usaha perikanan / Indeks yang dibayar usaha perikanan) x 100%	BPS
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	111,01	(Indeks yang diterima Nelayan / Indeks yang dibayar Nelayan) x 100%	BPS
3	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	111,63	(Indeks yang diterima pembudidaya ikan / Indeks yang dibayar pembudidaya ikan) x 100%	BPS
<b>SS3.1 Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>				
1	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	99,7	Jumlah total pelaku Usaha yang diperiksa/jumlah pelau Usaha yang patuh)/jenis usaha)x100%	DKP (data olahan)
2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	60,75	(Jumlah Tangkapan Ikan 80% dari tangkapan maksimum Lestari) x100	DKP(data olahan)
3	Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%)	96.78	(Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan / Total luas Kawasan perairan konservasi) x 100%	DKP(data olahan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun 2025 telah sesuai dengan RPJMD/RPD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan hal sebagai berikut

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam mendukung :
  - Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  - Pencapaian SDGs,
  - Pengentasan kemiskinan,
  - Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi,
  - Penurunan Stunting,
  - Pencapaian Pelayanan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan
  - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dalam rangka implementasi Ekonomi Biru di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2025, antara lain meliputi :
  - Jumlah program sebanyak 6 Program dan jumlah kegiatan sebanyak 23 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 72 sub kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan tersebar pada program prioritas Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kemudian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya kemudian dalam rangka mendukung Hilirisasi didukung oleh Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan untuk menjaga kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan didukung oleh Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. dan untuk mendukung Operasional kegiatan didukung oleh Program Penunjang Administrasi. dengan uraian sebagai berikut :
    1. **Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,**

Diarahkan pada : 1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, 2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, 3) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

**2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap,**

Diarahkan pada : 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil, 2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, 4) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, 5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

**3. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya,**

Diarahkan pada : 1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat, 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

**4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Diarahkan pada : 1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil, 2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

**5. Program Pengolahan dan Pemasaran produk perikanan,**

Diarahkan pada 1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, 2) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

**6. Program Penunjang Administrasi**

Diarahkan dan Fokus pada Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, 4) Administrasi

Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 10)

- Total kebutuhan dana/pagu (tentative) yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah **Rp. 93.757.689.961,33 sesuai RKPD Tahun 2025** sedangkan usulan Pagu dengan rincian anggaran per program .yaitu :

No	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	FOKUS
1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<b>Rp. 11.642.290.100</b>	Pengembangan Usaha Garam dan Sarpras Pndukung Produksi serta Rehabilitasi Kawasan pesisir
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	<b>Rp. 36.133.269.400</b>	Peningkatan Pendapatan dan pemberdayaan Nelayan,penyediaan prasarana Alat Tangkap Ramah Lingkungan serta pengembangan Pelabuhan perikanan
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	<b>Rp. 7.124.746.500</b>	Diseminasi Inovasi Teknologi Budidaya Rumput Laut, sarana budidaya mendorong ketahanan pangan dalam rangka penurunan stunting
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<b>Rp. 1.492.535.500</b>	Pengembangan Inovasi dan penerapan Standar dan Kelayakan Produk serta peningkatan kapasitas POKLASHAR
5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	<b>Rp. 4.306.335.000</b>	Pengendalian dan Menjaga kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6	Program Penunjang Adminsitasi	<b>Rp. 38.821.212.096</b>	Gaji dan Tunjangan, Dukungan Manajemen Operasional Program Kegiatan Teknis dan

			Rutin
	JUMLAH	<b>Rp.93.757.689.961,33</b>	Belum termasuk DAK

- c. Pada Rumusan Program Kegiatan terdapat ketidaksesuaian dengan rancangan awal karena terdapat beberapa penyesuaian berdasarkan Kepmendagri No. 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah dilakukan pemetaan numenklatur program dan kegiatan berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja Tahun 2024 terhadap kesesuaian dengan RKPD oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1 (Tabel TC-33)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				93,757,689,961.00				109,063,045,009.00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				93,757,689,961.00				109,063,045,009.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				93,757,689,961.00				109,063,045,009.00
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah		100 % 97 Huruf/A ngka 99,6 Huruf/A ngka	37,552,874,635.00			99,65Huruf /Angka 100% 98Huruf/A ngka	43,401,190,461.00
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 Dokumen	463,150,000.00			9Dokumen	1,405,169,500.00
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	129,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	368,397,000.00
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	13,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,180,000.00

3.25.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	18,975,000.00
3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	18,975,000.00
3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24,750,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	28,462,500.00
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Laporan	250,000,000.00
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	213,200,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	705,180,000.00
<b>3.25.01.1.02</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		45 Laporan	27,042,444,524.00			45Laporan	30,202,039,586.00
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189 Orang/ Bulan	26,927,274,524.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		217 Orang/ Bulan	30,069,594,086.00
3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	5,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	6,325,000.00
3.25.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2,970,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	3,415,500.00
3.25.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	6,325,000.00
3.25.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	29,700,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	34,155,000.00

3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	71,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	82,225,000.00
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah</i>		53 Laporan	57,000,000.00			53Laporan	111,780,000.00
3.25.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2,530,000.00
3.25.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	100,250,000.00
3.25.01.1.03.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	9,000,000.00

3.25.01.1.03.05	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah		1986874004 Rp	30,000,000.00			2036545854 Rp	00	34,500,000.
3.25.01.1.03.05	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sinjai,	1 Dokumen	30,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	00	34,500,000.
3.25.01.1.04			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
3.25.01.1.04.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7 Laporan	373,336,000.00			7Laporan		429,336,400.00
3.25.01.1.05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit		57,500,000.00
3.25.01.1.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189 Paket	185,703,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		217 Paket		213,558,450.00
3.25.01.1.05.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	4,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen		5,060,000.00
3.25.01.1.05.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	5,250,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen		6,037,500.00



3.25.01.1.05.04	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	48,983,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	00	56,330,450.
3.25.01.1.05.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	54,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Orang	00	62,100,000.
3.25.01.1.05.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Orang	25,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Orang	00	28,750,000.
3.25.01.1.05.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tamu Yang difasilitasi Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum		2574 Orang 120 Unit	1,618,015,500.00			2960Orang 138Unit		2,026,217,825.00
3.25.01.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	26,295,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket		30,239,825.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Paket	774,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket		890,100,000.00
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua	16 Paket	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		37 Paket	.00	115,000,000

			Kel/Desa Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	89,320,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	102,718,000.00
3.25.01.1.06.03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	140,400,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	161,460,000.00
3.25.01.1.06.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	528,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	715,200,000.00
3.25.01.1.06.08	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11,500,000.00
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	200,000,000.00			13Unit	345,000,000.00
3.25.01.1.06.10	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Paket	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	115,000,000.00
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	230,000,000.00
3.25.01.1.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		163 Laporan	5,453,928,611.00			163Laporan	5,552,397,150.00
3.25.01.1.07.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	879,277,835.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	950,001,506.00
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	75,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	100,000,000.00

3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137 Laporan	4,499,650,776.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		139 Laporan	4,502,395,644.00
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>		42 Unit	2,315,000,000.00			48Unit	3,294,750,000.00
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	1,650,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Unit	1,897,500,000.00
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	115,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Unit	132,250,000.00
3.25.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	115,000,000.00
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	1,000,000,000.00
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	150,000,000.00

3.25.01.1.09.09	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah produksi garam rakyat Jumlah produksi garam rakyat Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan		6,000 Ton 6,000 Ton 78.44 % 78.44 % 822.559,65 Ha 822.559,65 Ha	9,507,815,326.00			100% 100% 847.122,4Ha a 6,900Ton 6,900Ton 847.122,4Ha a	12,553,400,000.00
3.25.01.1.09.10	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas kawasan konservasi yang direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi		70 Hektar 14 Unit	6,481,165,326.00			14Unit 81Hektar	7,230,092,500.00
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578435,53 Ha	750,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24563 Ha	1,970,000,000.00
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77 Ha	5,581,165,326.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81 Ha	4,140,280,000.00
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	100,000,000.00
	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41 Dokumen	1,019,812,500.00
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-		-	16,750,000.00			12Rekomen dasi	19,262,500.00
	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	5,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	6,325,000.00
	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	11,250,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	12,937,500.00
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-		-	3,009,900,000.00			100% 6900Ton	5,304,045,000.00

	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720 Orang	2,859,900,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		720 Orang	4,754,045,000.00
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kelompok	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Kelompok	100,000,000.00
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	<i>Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kelompok	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Kelompok	450,000,000.00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	-		-	<b>31,854,000,000.00</b>			-	<b>33,179,504,548.00</b>
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-		-	16,067,000,000.00			131Kelomp ok 131Kelomp ok 500Unit 500Unit	12,465,000,000.00
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	<i>Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	115,000,000.00
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	6,375,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	5,750,000,000.00
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Unit	9,592,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		460 Unit	6,600,000,000.00
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	450,000,000.00			16Kelompo k 81Unit 16Kelompo k 81Unit	1,058,000,000.00
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Peraliran Darat</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,500,000.00

	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	<i>Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Unit	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Unit	932,500,000.00
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-		-	16,000,000.00			17Rekomen dasi	18,400,000.00
	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	<i>Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Persentase	16,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Persentase	18,400,000.00
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	15,000,000.00			165Dokume n	16,500,000.00
	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	<i>Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143 Dokumen	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		164 Dokumen	11,500,000.00
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,000,000.00
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-		-	15,306,000,000.00			8Pelabuhan 19Pelabuha n	19,621,604,548.00
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	<i>Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Pelabuhan Perikanan	156,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Pelabuhan Perikanan	294,400,000.00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	15,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		8 Unit	19,154,704,548.00
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	<i>Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Layanan	150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Layanan	172,500,000.00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	-		-	<b>10,007,000,000.00</b>			-	<b>12,291,550,000.00</b>

	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	5,000,000.00			10Rekomen dasi	5,750,000.00
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	<i>Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Rekomend asi	5,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Rekomend asi	5,750,000.00
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	22,000,000.00			14Laporan	25,300,000.00
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Rekomen dasi	22,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Rekomen dasi	25,300,000.00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-		-	4,580,000,000.00			684Unit 60Orang 684Unit 60Orang	4,460,500,000.00
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	115,000,000.00
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568 Unit	4,150,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		683 Unit	3,916,000,000.00
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	220,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	253,000,000.00
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Jumlah Pembudidaya</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	60,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Orang	69,000,000.00
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284 Unit	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		284 Unit	107,500,000.00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-		-	5,400,000,000.00			100Hektar 100Hektar 158Unit 20900000E kor 158Unit 20900000E kor	7,800,000,000.00

	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan,	40 Unit	4,400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		120 Unit	4,110,000,000.00
			Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua						
			Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	1,000,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		38 Unit	3,690,000,000.00
	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	-		-	<b>2,521,000,000.00</b>			-	<b>4,400,150,000.00</b>
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-		-	2,371,000,000.00			1179Dokumen 13Kelompok	4,211,650,000.00



	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	<i>Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568 Pelaku Usaha	80,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Pelaku Usaha	87,500,000.00
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	<i>Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jeneponto,	1054 Pelaku Usaha	2,125,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		1155 Pelaku Usaha	3,908,250,000.00
			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	<i>Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Pelaku Usaha	66,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Pelaku Usaha	75,900,000.00
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	<i>Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Kelompok Masyarakat	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK		13 Kelompok Masyarakat	130,000,000.00
	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	<i>Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Forum	0.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000.00
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	-		-	150,000,000.00			26Dokumen	188,500,000.00

	Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	<i>Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Pelaku Usaha	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Pelaku Usaha	57,500,000.00
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	<i>Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Pelaku Usaha	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pelaku Usaha	67,500,000.00
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	<i>Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115 Pelaku Usaha	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pelaku Usaha	63,500,000.00
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	-		-	<b>2,315,000,000.00</b>			-	<b>3,237,250,000.00</b>
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	55,000,000.00			85Rekomen dasi	63,250,000.00
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	27,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	31,625,000.00
	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Rekomendasi	27,500,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85 Rekomendasi	31,625,000.00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-		-	2,050,000,000.00			120Unit Usaha 70Unit Usaha	2,932,500,000.00
	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	<i>Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kegiatan	1,500,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 Kegiatan	2,300,000,000.00

	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	<i>Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kegiatan	550,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Kegiatan	632,500,000.00
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-		-	210,000,000.00			2Laporan	241,500,000.00
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	115,000,000.00
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	<i>Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Sistem Informasi	110,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Sistem Informasi	126,500,000.00
					<b>93,757,689,961.00</b>				<b>109,063,045,009.00</b>

Berdasarkan tabel diatas maka diuraikan sasaran strategis tahun 2025 yang akan didukung yaitu:

**Sasaran :**

- 1. Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi**
- 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan**

Didukung oleh program :

**Program Prioritas :**

- 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

**Indikator Program :**

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2025 sebesar Rp. 11.960.232.411**
- b. Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2025 sebesar 451.818.7 ton**
- c. Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional tahun 2025 sebesar 84,21 %**
- d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 2025 sebesar 30.25 %**
- e. Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2025 sebesar 31.23 %**

Program ini meliputi kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**  
Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air**  
Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- d. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan perikanan Provinsi  
Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
  - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
  - c. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan aspek kajian pengembangan dan pembangunan perikanan tangkap yang menentukan keberhasilan dan tingkat produktifitas unit usaha. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil berbasis Teknologi penangkapan ikan (fishing technology) yang diarahkan pada peningkatan produktifitas penangkapan sebagai target pencapaian dengan indikator kinerja diarahkan pada efektifitas dan efisiensi upaya penangkapan ikan yang dilakukan meliputi:

- a) Penerapan teknologi penangkapan ikan berbasis potensi ruang dengan menetapkan komoditas unggulan sebagai target tangkapan,
- b) Pemanfaatan teknologi alat bantu penangkapan ikan seperti, penggunaan Global Position Service (GPS), cahaya, umpan, dan resonansi suara
- c) Penanganan dan pengendalian teknologi penangkapan ikan yang overfishing dan tidak ramah lingkungan (destructive fishing) melalui pengelolaan jumlah dan jenis alat tangkap, pengaturan ukuran mata jaring untuk selektifitas target tangkapan, dan pembatasan daerah operasi penangkapan ikan pada zona terlarang.
- d) Pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Ikan
- e) Pelayanan rekomendasi usaha Perikanan tangkap dalam rangka perijinan dan kemudahan akses nelayan dalam melakukan usaha Perikanan tangkap di luar wilayah penangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan.
- f) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama yang berbasis antar pemerintah, institusi, lembaga dan swasta dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

- g) Revitalisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan yang lebih modern untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global.

Gambaran umum potensi pembangunan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga karakteristik wilayah pesisir yang khas/spesifik, yaitu perairan wilayah pesisir Teluk Bone, wilayah pesisir Laut Flores, dan wilayah pesisir Selat Makassar. Ketiga karakteristik wilayah perairan ini seharusnya mampu dioptimalkan pemanfaatannya sebagai potensi yang sangat besar dan luar biasa dalam mengakselerasi pembangunan perikanan tangkap dan mendukung *Marine Culture*.

Kajian ikan target tangkapan (fish target) dan daerah penangkapan ikan (fishing ground) dititikberatkan pada analisis entitas dan potensi ruang yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagai wilayah kajian dengan segala potensi sumberdaya ikan yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup kajian target tangkapan akan mendeskripsikan produksi dan potensi sumberdaya ikan yang berada pada suatu daerah penangkapan ikan melingkupi komposisi jenis, ukuran ikan, jumlah hasil tangkapan sebagai total produksi dan jumlah stok sumberdaya ikan, ekosistem dan habitat keberadaan target tangkapan, dan tingkah laku ikan target tangkapan. Pengetahuan dan pemahaman tingkah laku ikan target tangkapan terhadap penguasaan karakteristik daerah penangkapan merupakan acuan dasar dan basis pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Diperlukan manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, baik yang bersifat teknis pada teknologi penangkapan ikan maupun yang bersifat manajemen dalam pengelolaan base-line data secara sistematis dan terstruktur dari waktu ke waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan kondisi eksisting yang telah dicapai. Selain itu memberdayakan armada plasma yang merupakan kapal/perahu nelayan skala kecil untuk mendukung *marine culture*.

Peluang pengembangan perikanan tangkap dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan memfasilitasi pelayanan kepada nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan higienisasi sarana prasarana pelabuhan perikanan.

## **2. Program Perikanan Budidaya :**

### **Indikator Program :**

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya tahun 2025 Rp. 21.850.161.096.3**
- b. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2025 sebesar 4.331.299.7ton**
- c. Persentase ketersediaan benur berkualitas 85% per tahun**

Program ini diarahkan untuk mendukung keberhasilan pengembangan komoditas unggulan yaitu udang windu dan rumput laut serta komoditas ikan lainnya dimana dibutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014. Pemerintah provinsi selaku Pembina antar kabupaten/kota akan efektifkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi. Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Program ini meliputi kegiatan :

### **1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- c. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi

### **2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat**

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan ini adalah kelompok prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikatornya fokus pada nilai hilirisasi produk. Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2025 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan yaitu **udang windu** dan **rumput laut** dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi berbasis kawasan dan berkelanjutan sampai tahun 2025. Adapun tujuan program adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya, 3) Pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global. Adapun produksi komoditas unggulan perikanan budidaya pada tahun awal kondisi tahun 2018 dan 2020 dan rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Selain itu Program tersebut diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis perikanan di Sulawesi Selatan dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar di daerah lain termasuk luar negeri, melalui usaha ini akan memicu laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Selain itu dilakukan pengembangan kampung pembudidaya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, kampung ini diharapkan dapat memulihkan Ekonomi masyarakat dengan Corporate Farming dengan membangun Kampung-Kampung Perikanan Budidaya Tawar, Payau Dan Laut seperti *Kampung Lobster, Lele, Nila, Kakap, Kerapu, Rumput Laut, dll.*

Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang, Bandeng dan komoditas ikan lainnya. Dalam rangka pencapaian target kinerja maka implementasi program, kegiatan dan subkegiatan lebih diarahkan pada:

- a. Pengembangan budidaya rumput laut dengan melakukan pengembangan dari hulu yaitu pengembangan bibit hasil kultur jaringan dan hilir yaitu penanganan pasca panen di 19 kabupaten/kota serta percontohan budidaya laut (*marine culture*) yang ramah lingkungan di kabupaten/kota yang sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan untuk produksi benur yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan benur pada program prioritas dan permintaan masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya payau.



- c. Pengembangan budidaya air tawar sesuai kewenangan provinsi dan pemeliharaan sarpras instalasi Balai Benih Ikan Provinsi dalam rangka peningkatan produksi benih komoditas ikan air tawar dan memenuhi kebutuhan benih dalam rangka pemulihan ekonomi.
- d. Revitalisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya payau dan air tawar dalam rangka peningkatan produksi, pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana alam dan pandemik global dan ketersediaan pangan ikan dari perikanan budidaya untuk penanganan stunting.
- e. Pengendalian dan pengelolaan Kesehatan lingkungan budidaya payau, tawar dan laut.
- f. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas daerah.
- g. Penyediaan prasarana produksi budidaya air tawar dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan keluarga untuk mendukung penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan, perluasan jejaring, kerjasama antar pemerintah, institusi, lembaga, swasta dan kemitraan serta mengoptimalkan hilirisasi produk yang dapat memberikan dampak perekonomian daerah.

### **3. Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

#### **Indikator Program**

- a. **Produksi garam rakyat tahun 2025 sebesar 105.320 ton**
- b. **Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan tahun 2025 sebesar 78,44%**

Dalam rangka pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diupayakan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan ruang, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program ini diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu program yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya

dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan. Adapun dukungan kegiatannya adalah Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pada program, kegiatan dan sub kegiatan ini diarahkan pada pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep , Kabupaten Maros dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam mini, penerapan teknologi produksi dan penanganan pasca panen. Dalam rangka mendukung industrialisasi garam dilakukan kerjasama lintas sektor dimana peran yang akan dilakukan yaitu dapat menjamin ketersediaan stok/bahan baku garam untuk industrialisasi dan melakukan inovasi produk garam menjadi produk yang lebih berdaya saing.

#### **4. Program Pengolahan dan Pemasaran Indikator Program :**

- a. **Nilai Hilirisasi Produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2025 sebesar Rp. 391.94 Milyar**
- b. **Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2025 sebesar 6.150,43 ton**
- c. **Persentase pembinaan mutu produk perikanan tahun 2025 sebesar 100%**

Tahun 2025 akan dilakukan upaya untuk mendukung hilirisasi produk perikanan dan melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. Dalam rangka peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat dan

menghasilkan produk yang berdaya saing untuk menghadapi masa pandemik dan menumbuhkan kembali usaha unit pengolah yang tahun 2020 mengalami masa sulit dalam berusaha akibat pandemik global maka optimalisasi pengembangan yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan fasilitasi bimbingan, pembinaan dan revitalisasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran dalam mendukung bahan baku industri serta melakukan inovasi olahan produk perikanan. Adapun dukungan kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran diarahkan pada program hilirisasi perikanan dengan melakukan inovasi produk pengolahan agar produk perikanan memiliki nilai tambah produk sehingga memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu program ini mendukung pencapaian indikator SDGs untuk penurunan stunting dan pemulihan ekonomi. Selain itu dalam rangka mendukung industrialisasi, akan dilakukan pemetaan dan pemantauan bahan baku usaha pengolahan, pengujian sampel mutu produk, dan pengembangan informasi manajemen logistik ikan secara digitalisasi.

**Sasaran : Meningkatkan kelestarian dan pengendalian pemanfaatan**

## **sumberdaya alam kelautan dan perikanan**

Didukung oleh program :

### **Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

#### **Indikator Program :**

- a. **luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan tahun 2025 sebesar 96,4%**

Program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Usaha tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berkeadilan. Tujuan yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan daya tarik wilayah terhadap investor termasuk kunjungan wisata dan sekaligus juga dapat memberi iklim yang kondusif bagi Sulawesi Selatan dalam pengembangan kegiatan konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 2 kawasan konservasi (Liukang Tupabiring, Liukang Tangaya) sudah operasional dengan nilai EVIKA masing-masing sebesar 27.98 dan 21.67. Selain itu, ada 3 kawasan konservasi (Kauna Kayuadi, Pasigusung, Panikiang) yang sudah ditetapkan di tahun 2024 sehingga kawasan konservasi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dengan total seluas 578435.53 Ha serta mendukung penurunan/emisi karbon dengan melakukan rehabilitasi Kawasan mangrove.

Pada program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi  
Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi  
Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat

b. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun upaya yang dilakukan pada sub kegiatan adalah

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan inovasi pemanfaatan dan pengelolaan.
- e. Penyusunan kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang
- f. Pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan
- g. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses
- h. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- i. Pengembangan Wisata Bahari dan pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem pesisir dengan integrasi pengembangan lintas sektor serta edukasi kepada masyarakat.
- j. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendukung kelestarian kawasan konservasi dan melakukan pembinaan kelompok.

**Sasaran Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan**

**Indikator :**

- a. Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tahun 2025 sebesar 97,8%
- b. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam Batasan biologis yang aman tahun 2025 sebesar 48,12%

**e. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

**f. Indikator Program :**

**g. Cakupan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tahun 2025 sebesar 100%**

Pada program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk system pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan khususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

**1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
- c. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
- d. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

**2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
- c. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Usaha yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan yaitu :

1. Patroli dalam rangka pengawasan baik di laut, perairan umum dan darat serta koordinasi dan pengawasan terpadu bersama aparat terkait dalam rangka melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran dan penanganan kasus.
2. Kerjasama antar pemerintah pusat, kabupaten/kota maupun provinsi lain dalam rangka pengawasan wilayah laut dan perairan umum.
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terhadap larangan penggunaan bahan dan alat tangkap yang dapat merusak sumberdaya perikanan.
4. Intensifikasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bahan terlarang untuk penanganan hasil perikanan
5. Pelatihan kesadaran masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan sumberdaya perikanan yang dilaksanakan dengan melibatkan kaum muda yang berada di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.
6. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat Pengawas Perikanan disetiap daerah dan melakukan pembinaan
7. Himbauan dan larangan terhadap pengambilan terumbu karang dan biota - biota tertentu yang dianggap telah hampir punah.
8. Melalui usaha tersebut diatas, maka diharapkan tingkat kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan berkurang dan terjadi peningkatan produktivitas tangkapan ikan.

Untuk kelancaran dan dukungan operasional kegiatan maka terdapat Program Penunjang untuk mendukung Program Utama yaitu :

## **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Indikator Program :

- a. Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah
- b. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik
- c. Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP

Pada program ini akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

### **1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

### **3. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD



- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

**4. *Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi DaerahPengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- d. Pengolahan Data Retribusi Daerah
- e. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- f. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

**5. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- h. Pemindahan Tugas ASN
- i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**6. *Administrasi Umum Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

**7. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Aset Tak Berwujud

**8. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**9. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berikut pohon Kinerja untuk tahun 2025 seperti pada gambar dibawah ini :

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Catatan Penting**

Berdasarkan hasil Musrenbang Provinsi terdapat beberapa usulan bantuan hibah masyarakat yang diakomodir dan diharapkan kabupaten/kota dan aspirasi pokok-pokok pikiran dapat memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan hibah yang berlaku. Selain itu kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat karena pada tahun 2025 diarahkan pada program prioritas pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai upaya untuk peningkatan ekonomi pada masyarakat pesisir, dan perbaikan/ restorasi kawasan mangrove dalam rangka penataan dan perbaikan lingkungan pesisir. Dalam pelaksanaannya ke depan maka perlu kesiapan dan dukungan anggaran serta secara teknis agar kabupaten/kota dapat membantu masyarakatnya untuk memenuhi persyaratan dan integritas dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut. Namun seandainya anggaran yang ada tidak tersedia maka alternative yang ditempuh adalah dengan memilih kegiatan yang lebih prioritas sesuai kebijakan pemerintah daerah.

#### **1.2. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2025. Renja ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk optimalisasi dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD/RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dicapai. Perencanaan tidak berhenti pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan Rencana dan Tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu **prosedur standar** pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membuktikan (*Proving*) kinerja dan untuk memperbaiki (*Improving*) kinerja. Adapun kendala yang masih dihadapi adalah :

**a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan**

Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha;

**b. Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien**

Penerapan *e-government* belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur masih sering terjadi;

**c. Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif**

Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi pemerintah. Perbaikan gaji dan tambahan penghasilan pegawai masih terkendala dengan besarnya pendapatan daerah dan penilaian kinerja .

**d. Inefisiensi penggunaan anggaran**

Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:

- 1) belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan 2) besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan;

**e. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan**

Menyadari bahwa kemampuan Sumberdaya Masyarakat yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbatas, maka guna mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan perikanan di Sulawesi Selatan sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta perikanan, dan masyarakat pelaku usaha perikanan. Dukungan tersebut, baik berupa saran dan koreksi untuk menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025.

Perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun diluar pemerintahan.

**1.3. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah serta pemeliharaan kesejahteraan masyarakat mendukung sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja OPD ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 oleh masing-masing unit kerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan Sulawesi Selatan ke depan.

Kerjasama dan kolaborasi stakeholder, diharapkan dapat memantapkan posisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun perikanan di Sulawesi Selatan dan Nasional, dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penghasil devisa, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.



